

PARTAI ISLAM DI KOMUNITAS ABANGAN

*(Studi kasus kemenangan Partai Keadilan sejahtera (PKS) di Desa Jetak
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada Pemilu 2004)*

TESIS



Diajukan Oleh :

Nama : Muh. Haris

NIM : D4B.004050

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2008

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

**PARTAI ISLAM DI KOMUNITAS ABANGAN (STUDI KASUS KEMENANGAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI DESA JETAK KECAMATAN GETASAN
KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILU 2004)**

Yang disusun oleh Muh. Haris, NIM : D4B 004 050

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal Agustus 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua Penguji

Anggota Penguji

Drs. Warsito, SU

1. Drs. Hamid Widodo, MPd

2. Drs Tri Cahyo Utomo, MA

Sekretaris Penguji

Drs. Purwoko, MS

Semarang, September 2008

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik

Drs. Purwoko, MS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Satu, Maha Perkasa, Maha Mulia dan Maha Pengampun. Dzat yang mengubah malam menjadi siang. Dimana hal itu merupakan peringatan bagi orang yang mau berpikir. Juga sebagai wahana pengetahuan bagi mereka yang mau menjadikan pelajaran. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tauladan mulia sepanjang masa, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang berjalan diatas sunnah beliau sampai hari akhir.

Sungguh penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya Tesis ini. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Bpk Drs Purwoko, MS selaku ketua program studi MIP UNDIP dan sekaligus sebagai pembimbing Anggota yang sudah memberikan banyak dukungan kepada kami.
2. Bpk Drs. Warsito, SU selaku dosen pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam mengerjakan tesis ini.
3. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pengajar program studi MIP UNDIP yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pendidikan di MIP UNDIP..
4. Istriku tersayang Ida Nur Farida yang banyak mensupport kami selama menjalani pendidikan dan melakukan penelitian untuk tesis ini
5. Kelima buah hatiku AF Ismail Farros, A Zaki romadhon, alma Karimah, Maryam Qonita, M zulkifli Akmal yang selalu memberi semangat kepada kami.

6. Serta saudaraku ikhwan dan akhwat fillah keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang sudah banyak membantu dalam melakukan penelitian dan sehingga dapat membuat penulisan tesis ini dengan baik.
7. Dan semua pihak pihak yang telah membantu hingga terwujudnya tesis, Semoga Allah yang dapat memberikan balasan atas bantuan yang telah di berikan kepada kami.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang ada. Besar harapan penulis, Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Semarang, 08 Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR	ii
PENGESAHAN		
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. RUANG LINGKUP MASALAH	15
	C. TUJUAN PENELITIAN	15
	D. MANFAAT PENELITIAN	15
	E. METODE PENELITIAN	16
	E.1 PENDEKATAN	16
	E.2 SUMBER DATA	17
	E.3 METODE PENGUMPULAN DATA	18
	E.4 TEKNIK ANALISA DATA	19
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	1. SEJARAH LAHIRNYA PARTAI POLITIK	21
	2. BUDAYA POLITIK	22
	3. ALIRAN PEMIKIRAN PARTAI DI INDONESIA	28
	4. PERILAKU PEMILIH DI INDONESIA	34
BAB III	GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN JETAK	37
	A. SEJARAH DAN KIPRAH PKS	37
	B. FENOMENA PKS JAWA TENGAH	44
	B.1 SEJARAH PK	44
	B.2 PRESTASI PK	46
	B.3 FASE BARU PERJUANGAN PARTAI KEADILAN	47
	B.4 PKS PROVINSI JAWA	49

	TENGAH		
	B.5 PKS JAWA TENGAH	51
	PADA PEMILU 2004		
	B.6 PEROLEHAN KURSI PKS	52
	JAWA TENGAH		
	B.7 PK KABUPATEN	54
	SEMARANG		
	B.8 PKS ABUPATEN	55
	SEMARANG		
	B.9 PKS DESA JETAK	55
	C. KEADAAN GEOGRAFI DESA	56
	JETAK KEC. GETASAN KAB.		
	SEMARANG		
	D. KEADAAN DEMOGRAFI	57
	DESA JETAK KEC. GETASAN		
BAB IV	KEMENANGAN PKS DI DESA JETAK		
	A. ALASAN MASYARAKAT DESA	59
	MEMILIH PARTAI		
	B. DESKRIPSI HASIL	63
	WAWANCARA RESPONDEN		
	PENDUKUNG PKS		
	C. MENGAPA MASYARAKAT	72
	JETAK MEMILIH PKS ?		
	C.1 FENOMENA DEMOKRASI	72
	PALING SANTUN		
	C.2 KEBERPIHAKAN PADA	74
	WONG CILIK		
	C.3 PARTAI YANG BERSIH	75
	DAN PEDULI		
	C.4 PERANAN TOKOH LOKAL	77
	C.5 PERANAN STRUKTUR	78
	PARTAI		
BAB V	PENUTUP		
	A. KESIMPULAN	79
	B. SARAN	80
BAFTAR PUSTAKA		82

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI-PARTAI PESERTA PEMILU 1995	7
TABEL 2	PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI-PARTAI ISLAM DAN PARTAI-PARTAI SEKULER PADA PEMILU 1999 DI INDONESIA	10
TABEL 3	PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2004 DI INDONESIA	11
TABEL 4	PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI-PARTAI ISLAM DAN PARTAI-PARTAI SEKULER PADA PEMILU 1999 DI DESA JETAK	13
TABEL 5	PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI-PARTAI ISLAM DAN PARTAI-PARTAI SEKULER PADA PEMILU 2004 DI DESA JETAK	14
TABEL 6	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 PKS JAWA TENGAH	51
TABEL 7	DAFTAR ANGGOTA LEGIS LATIF PKS JAWA TENGAH HASIL PEMILU 2004	53

Abstraksi

Desa Jetak adalah salah satu desa di pedalaman Jawa Tengah yang pada Pemilu 2004 lalu dimenangkan oleh PKS. Dilihat dari kesadaran beragama, menurut Geertz mayoritas masyarakat, masuk kategori abangan, karena mereka umumnya tidak taat dalam menjalankan perintah agama. Dilihat dari tingkat pendidikan, desa di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tersebut mayoritas hanya tamat sekolah dasar. Sepanjang pemilu masa Orde Baru sebanyak 6 kali selalu dimenangkan oleh Golkar, sedangkan pada pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku pemilih di desa Jetak, Kabupaten Semarang, terutama alasan masyarakat memilih PKS Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan alasan utama masyarakat memilih PKS adalah; pertama fenomena demonstrasi yang santun menunjukkan keteraturan dan menunjukkan kualitas para kadernya. Kedua, keberpihakan pada wong cilik yang dibuktikan dengan kehadiran aktifitas sosial dan pendidikan di lingkup desa. Ketiga, partai yang bersih dan peduli, citra yang dibangun oleh anggota legislatif yang bebas korupsi mampu terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Keempat, peranan tokoh lokal, keterlibatan tokoh lokal baik tokoh keagamaan, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat yang mendukung PKS sangat membantu untuk mengarahkan masyarakat pemilih. Kelima, Struktur Partai yang sampai tingkat desa mampu membantu masyarakat untuk lebih dekat dan merasakan keberadaan partai.

Kata Kunci : PKS, Desa Jetak, Jawa Tengah

Abstract

During of general election held on 2004, Jetak village is one of the Central Java area gets dominants vote. Majority people in Jetak village has low loyalty with religious, Geertz call them with 'Abangan' community. Almost people in jetak village have low education level because almost of them the just finished primary school. During of six time general election in 'Orde Baru' Golkar always setting the first sequence and in 1999 PDIP in the first sequence but different in 2004 PKS has first sequence in election held.

The Purpose of this research are to find out what is the significant factor in influence the behavior of people at Jetak Village, specially what is the reason to choose PKS. Method for this research used qualitative method with descriptive analysis type.

The main finding of this research is the people in jetak village want to choose PKS because in this research we found, first, demonstration phenomena can show capability and quality of PKS members. Second, PKS can establish they approach to Village people with social and study activity. Third, PKS is united with clean, care and professional people has build by legislative people with free corruption. Fourth, contributed from local people who is religious people and government people can help and motivate in Village Community. Fifth, the united structure cans growth until community village and can help people to be closer and can feel the united approach.

Key word: PKS, Jetak village, Central of Java.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Partai politik merupakan fenomena modern bagi negara-negara di dunia. Istilah tersebut baru muncul pada abad 19 Masehi, seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan, dilaksanakannya pemilihan umum, dan meluasnya hak-hak orang yang ambil bagian dalam pemilihan umum (Irsyam, 2003 : 11). Menurut catatan para ahli, pada tahun 1950-an hampir semua *nation states* di dunia, baik negara maju maupun berkembang sudah mengenal dan memiliki partai politik (Dhakidae, 19858 : 189).

Partai Politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem keterwakilan, baik dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Berbeda dengan demokrasi langsung sebagai praktek di masa Yunani kuno, demokrasi modern sebagai demokrasi tak langsung membutuhkan media penyalang pesan politik kepada negara (pemerintah). Media yang berupa institusi tersebut biasa kita sebut dengan partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern.

Mengingat pentingnya fungsi partai politik, sering keberadaan dan kinerja merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dari pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan yang berjalan. Terutama bagi partai pemenang pemilihan atau partai yang berkuasa dan partai oposisi yang berjalan efektif, partai politik merupakan pelaksana pemerintah yang tersembunyi. Keberadaannya mempengaruhi ragam

kebijakan yang dikembangkan. Karena itu bisa dikatakan bahwa kegagalan sekaligus keberhasilan suatu pemerintahan dalam melayani dan memakmurkan rakyatnya adalah kegagalan dan keberhasilan partai politik menjalankan fungsinya secara efektif.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang untuk menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Oleh karena itulah, di negara-negara berkembang umumnya partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Pentingnya partai politik dalam mencapai tujuan-tujuan politik, ditamsilkan oleh Richard M. Merelman dengan, "politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air" (Duverger, 1981 : V).

Mempertegas pentingnya keberadaan partai dalam proses politik, secara lebih elaboratif Miriam Budiharjo (2004 : 163-164) memaparkan empat macam fungsi partai politik, yakni : *pertama*, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam konteks ini ada yang disebut *interest aggregation* (penggabungan kepentingan) dan *interest articulation* (perumusan kepentingan), *kedua*, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik (*instrumentof political socialization*). *Ketiga*, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, dengan pengertian bahwa partai akan terus aktif mencari anggota (*political recruitment*). *Keempat*, partai politik sebagai sarana *conflic management* (pengatur konflik).

Bagi Indonesia, kehidupan partai politik dalam arti sesungguhnya dimulai pasca kemerdekaan, yaitu sejak pemerintah melalui Wakil Presiden, Muhammad Hatta mengeluarkan

maklumat Pemerintah No. X tentang pendirian partai politik pada tanggal 3 Nopember 1945. Maklumat tersebut menyatakan bahwa :

”Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat” (Irsyam, 2003 : 113).

Sejak keluarnya maklumat tersebut setiap kelompok dan golongan berlomba-lomba mendirikan partai. Puncaknya adalah pada tahun 1955, ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama, yang diikuti oleh tidak kurang 36 partai politik, dengan 27 partai politik yang mendapatkan kursi dalam parlemen (Dhakidae, 1985 : 203).

Sejak awal kelahirannya, partai-partai politik di Indonesia sudah kental dengan nuansa ideologis atau partai aliran, yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni partai islam dan partai sekuler. Di luar keduanya, misalnya partai Kristen dan Katholik, karena jumlah pendukungnya tidak terlalu besar, maka tidak begitu menentukan dalam dinamika sejarah kepartaian di Indonesia.

Dinamika pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran dan gerakan politik di dunia Islam, khususnya timur Tengah. Bagaimana pengaruh pemikiran dan gerakan politik itu berlangsung, ditentukan oleh beberapa faktor.

Pertama, di Indonesia selama era orde baru, potensi umat yang besar dalam gerakan politik tidak sepenuhnya dapat diakomodir ke dalam organisasi Islam yang ada, seperti Muhammadiyah atau NU. Sebagian terbesar umat di Indonesia justru tidak menjadikan Muhammadiyah atau NU sebagai wadah untuk mewujudkan gerakan politik. Ini karena adanya realitas obyektid yang tak terbantahkan bahwa dua organisasi besar itu bukan partai politik,

melainkan organisasi sosial keagamaan. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam sejak paruh pertama dekade 1970-an ternyata tak dapat memainkan peran agregasi dan artikulasi umat Islam akibat terlalu kuatnya otoritarianisme kekuasaan rezim Soeharto.

Kedua, ketika aspirasi politik umat semakin besar, maka ada kebutuhan yang semakin besar pula untuk menemukan format gerakan Islam politik pada referensi-referensi tertentu. Pada giliran selanjutnya, pemikiran politik yang datang dari dunia luar sangat mudah berfungsi sebagai referensi terbentuknya gerakan politik Islam di Indonesia. Sebagaimana muncul di kota-kota besar Indonesia selama dasawarsa 1980-an, proses ke arah “Islamisasi” sosiokultural marak terjadi, yang ditandai oleh perkembangan dakwah di perkantoran, Kawasan-kawasan bisnis dan di daerah elit serta semarak pengkajian Islam di kampus-kampus perguruan tinggi. Dalam situasi seperti itulah berlangsung penyebaran pemikiran politik Islam dari dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dengan akselerasi yang cukup besar.

Ketiga, upaya pencarian referensi gerakan politik ke arah pemikiran yang berkembang di dunia Islam itu semakin didorong oleh kondisi dalam negeri yang sangat kritis dibawah bayang-bayang kekuasaan rezim Soeharto yang otoriter. Kalau kita menengok pada situasi politik selama 1980-1990, hubungan antara umat Islam dan pemerintah tidak harmonis. bahkan timbul perseteruan panjang yang diwarnai bentrokan yang meminta korban. Hampir semua kelompok dalam Islam mengalami “pengasingan” di negerinya sendiri.

Tiga hal ini kemudian membentuk sebuah persenyawaan yang mempertegas besarnya perhatian Islam politik di Indonesia terhadap pemikiran dan gerakan Islam di timur Tengah atau dunia Islam pada umumnya. Inilah yang dapat dipahami dari apa yang pernah ditulis M. Amien Rais bahwa tanpa bisa dielakkan lalu muncul atmosfer yang menyebabkan begitu mudahnya

pemikiran revolusioner Al-Ikhwan A-Muslimun di Mesir, dengan Hasan Al-Banna sebagai tokoh besarnya, memperoleh persemaian subur di Indonesia.

Selanjutnya meskipun tidak selalu berada dalam format hubungan sebab akibat yang dapat dibaca secara gamblang, ada resonansi tertentu dari pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Merupakan sebuah kekeliruan besar atau amat fatal jika menyebut tradisi Islam di Nusantara tidak mempunyai kaitan dengan Islam di Timur Tengah. Dalam konteks ini, pengaruh pemikiran dan gerakan politik Islam di Timur Tengah terhadap pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia acapkali bersifat kualitatif. Khusus pemikiran tentang hubungan antara Islam dan politik di Indonesia, tak dapat diabaikan posisi pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun serta pengaruh dan reformulasinya dalam pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia.

Bersamaan dengan munculnya liberalisme politik yang ditandai oleh pluralisme partai politik dengan membawa beragam ideologi dan strategi perjuangan, maka timbul keinginan untuk mendirikan partai politik Islam dikalangan aktivis Islam kampus era 80-an. Untuk itu dilakukanlah sebuah survei terbatas di kalangan aktivis Islam kampus tentang perlu tidaknya mendirikan partai Islam untuk mewadahi aspirasi mereka di bidang politik. Hasilnya, 60 % lebih responden menyatakan setuju berdirinya partai Islam yang kemudian bernama Partai Keadilan.

Landasan filosofis berdirinya Partai Keadilan ialah manusia sebagai khalifah Allah di bumi tidak mungkin mengelak dari tanggung jawab melaksanakan misi khilafah, yaitu memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi melalui gerakan politik otentik. Filosofis ini berangkat dari pemahaman akan universalitas Islam, sebagaimana dirumuskan Hasan Al-Banna. Pemikiran Hasan Al-Banna yang dijadikan rujukan Partai Keadilan yang termaktub dalam filosofinya Partai Keadilan adalah sebagai berikut :

“Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar”.

Al Chaidar (1419:vi) membedakan antara partai Islam dengan partai Sekuler sebagai berikut. Parttai Islam adalah partai yang dipimpin oleh tokoh Islam, memakai asas Islam maupun bukan Islam sebagai fondamen partai, dan dalam meraih simpati untuk merebut suara menjadikan kalangan Islam sebagai basis utama dukungan. Adapun partai sekuler adalah partai yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memandang partai secara pragmatis sebagai alat pembentuk bulat lonjongnya negeri ini, dan bertujuan kepada negara sekuler yang makmur, bahagia, dan sejahtera. Pada pemilihan umum pertama sejak merdeka, 1955, perolehan suara partai Islam dan partai sekuler, tergambar sebagai berikut :

Tabel 1

Perolehan Suara dan Kursi Partai-Partai Peserta Pemilu 1955

Nama Partai	Jumlah Suara yang Diraih	Prosentase	Kursi Parlemen
PNI	8.434.653	22,3 %	57
Masyumi	7.903.886	20,9 %	57
NU	6.955.141	18,4 %	45
PKI	6.176.913	16,4 %	39
Lain-Lain	8.314.705	22,0 %	59
Total	37.785.298	100 %	257

(Sumber : Kamarudin, 2003 : 21)

Secara teoritis, hasil pemilu 1955 merupakan *frame of reference* tentang konfigurasi ”papan catur” politik Indonesia (Kamarudin, 2003 : 21) yang diwarnai dengan kuatnya nuansa politik aliran. Fenomena yang sangat menonjol adalah pengelompokan politik terjadi menurut kesamaan orientasi budaya, yaitu ikatan sekelompok orang kepada *dominant culture* dalam

kelompoknya (Geertz, 1981). Inilah yang kemudian dikembangkan oleh Clifford Geertz menjadi varian sikap keagamaan masyarakat Islam Jawa. Dalam konteks tersebut, kategori abangan adalah aliran dengan kebudayaan Jawa sebagai kebudayaan yang dominan. Mereka menjadikan pranata dan nilai-nilai Jawa sebagai panduan hidup mereka. Santri menerima Islam sebagai kebudayaan dominan yang mempengaruhi perilaku hidup mereka, priyayi adalah mereka yang kental dengan warisan kebudayaan Hindu dan etiket kraton. Sekalipun mengundang kritik dari banyak peneliti sesudahnya, kategori yang dibuat oleh Geertz tersebut memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu sosial di Indonesia.

Jika dilihat empat partai politik tersebar yang memenangkan Pemilu 1955 sebagaimana tergambar di atas, maka pendukung PNI pada umumnya adalah golongan priyayi, pemilih NU dan Masyumi mayoritas adalah santri, sedangkan PKI merupakan tempat berkumpulnya kelompok abangan. Hasil pemilu pertama sejak Indonesia merdeka tersebut, menghasilkan kesimpulan penting di kalangan para peneliti, bahwa tumbuh dan berkembangnya partai politik di Indonesia sangat diwarnai oleh politik aliran.

Dengan iklim demokrasi tidak sebaik Pemilu 1955, nuansa politik aliran masih tetap mewarnai pada dua kali pemilu pertama masa orde baru; pemilu 1971 dan 1977 walaupun sudah melemah akibat intervensi negara yang demikian kuat. Adapun pemilu-pemilu berikutnya masa orde baru; 1982, 1987, 1992, dan 1997, jauh dari suasana demokratis, sehingga pemilu hanyalah "seremonial" rutin lima tahunan untuk memenuhi kepatutan agar disebut sebagai negara demokrasi.

Kejatuhan rejim otoriter Orde Baru, 1998, kembali membuka peluang bagi partai politik untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, maka tidak kurang dari 169 partai lahir dalam waktu singkat. Sesudah dilakukan proses verifikasi, 48 partai politik dinyatakan lulus seleksi

untuk mengikuti pemilu (Koirudin, 2004 : 52). Iklim demokratis yang tumbuh kembali pasca kejatuhan Orde Baru memberi peluang kembali lahirnya nuansa politik aliran sebagaimana pemilu 1955. Oleh karena itu wacana yang kembali mengemuka seiring dengan munculnya partai-partai berbasis agama, suku, dan golongan adalah kebangkitan kembali politik aliran. Dari 48 partai peserta pemilu 1999, terdapat 20 partai atas dasar agama (Islam), dan 28 partai politik non agama (sekuler) dengan perbandingan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2
Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi Partai-Partai Islam dan Partai-Partai Sekuler
pada Pemilu 1999 Di Indonesia

PARTAI-PARTAI ISLAM				
N o	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi DPR	
1	PPP	11.329.905	58	12,5 %
2	PKB	13.336.823	51	11,0 %
3	PAN	7.488.956	34	7,4 %
4	PBB	2.069.708	13	2,8 %
5	PK	1.436.563	7	1,5 %
6	PNU	679.178	5	1,1 %
7	PP	551.028	1	0,2 %
8	PPIIM	456.718	1	0,2 %
9	PSII	375.920	1	0,2 %
10	PKU	300.064	1	0,2 %
11	KAMMI	289.489	-	-
12	UI	269.309	-	-
13	PAY	213.979	-	-
14	PIB	192.712	-	-
15	SUNI	179.367	-	-
16	PCD	171.087	-	-
17	PPMB	152.589	-	-
18	PSII 1905	152.820	-	-
19	PID	62.871	-	-
20	PUMI	49.639	-	-
Jumlah		39.758.725	172	37,1 %

PARTAI-PARTAI SEKULER				
No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi DPR	
1	PDI P	35.689.073	153	33,1 %
2	GOLKAR	23.769.266	120	26 %
3	PDKB	550.846	5	1,1 %
4	PKP	1.049.568	4	0,9 %
5	PDI	655.082	2	0,4 %
6	PBI	364.291	1	0,2 %
7	PDR	427.854	2	0,4 %
8	IPKI	328.561	1	0,2 %
9	PNI MM	345.720	1	0,2 %
10	PNI FM	366.176	1	0,2 %
11	PNI	375.137	-	-
12	KRISNA	369.719	-	-
13	PKD	216.675	-	-
14	PR	215.920	-	-
15	MKGR	204.204	-	-
16	PUDI	140.980	-	-
17	PBN	111.629	-	-
18	PKM	104.385	-	-
19	PND	96.984	-	-
20	PNBI	86.136	-	-
21	PADI	85.838	-	-
22	PRD	78.733	-	-
23	PPI	63.934	-	-
24	MURBA	62.006	-	-
25	SPSI	61.105	-	-
26	PARI	54.790	-	-
27	PSP	49.807	-	-
28	PILAR	40.517	-	-
Jumlah		66.087.275	290	62,7 %

(Sumber : Kamarudin, 2003 : 112)

Dari tabel perbandingan di atas, tampak bahwa telah terjadi proses perubahan perilaku politik di Indonesia. Kalau pada tahun 1955, partai yang berbasis Islam dibandingkan dengan partai non agama hampir berimbang, maka pada pemilu 1999 perolehan suara partai Islam jauh

di bawah partai sekuler, hal ini tidak bisa dipisahkan dengan gejala politik yang terjadi di luar jawa, yang dulu menjadi basis Masyumi, pada pemilu 1999 menjadi basis Partai Golkar.

Pada Pemilu 2004 jumlah kontestan mengalami penurunan, yaitu 24 partai politik dengan komposisi 8 partai Islam, dan 14 partai sekuler dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 3
Perbandingan Perolehan Suara Pada Pemilu 2004 Di Indonesia

PARTAI-PARTAI ISLAM				PARTAI-PARTAI SEKULER			
No	Partai	Jumlah Suara	Prosentase	No	Partai	Jumlah Suara	Prosentase
1	PBB	2.970.487	2,62 %	1	PNIM	923.159	0,81 %
2	PPP	9.248.764	8,15 %	2	PBSD	636.397	0,56 %
3	PPNU	895.610	0,79 %	3	PM	842.541	0,74 %
4	PAN	7.363.324	6,44 %	4	PPDK	1.313.645	1,16 %
5	PKB	11.989.564	10,57 %	5	PPIB	672.952	0,59 %
6	PKS	8.325.020	7,34 %	6	PNBK	1.230.455	1,08 %
7	PBR	2.764.998	2,44 %	7	PD	8.455.225	7,45 %
8	PSI	679.296	0,60 %	8	PKPI	1.424.240	1,26 %
Jumlah		44.237.063	38,95 %	9	PPDI	855.811	0,75 %
				10	PKPB	2.399.290	2,11 %
				11	PDIP	21.026.629	18,53 %
				12	PDS	2.414.254	2,13 %
				13	GOLKAR	24.480.757	21,58 %
				14	PP PANCA SILA	1.073.139	0,95 %
				15	PPD	657.916	0,58 %
				16	P. PELOPOR	878.932	0,77 %
				Jumlah		69.285.351	61,05 %

(Sumber : koirudin, 2004 : 303)

Desa Jetak adalah salah satu desa di pedalaman Jawa Tengah yang pada Pemilu 2004 lalu dimenangkan oleh PKS. Dilihat dari kesadaran beragama, desa yang berada di lereng Merbabu tersebut, mayoritas masyarakat, meminjam istilah Geertz, masuk kategori abangan, karena mereka umumnya tidak taat dalam menjalankan perintah agama. Dilihat dari tingkat pendidikan, desa di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tersebut mayoritas hanya tamat sekolah dasar. Dilihat dari mata pencahariannya adalah petani. Sepanjang pemilu masa Orde Baru sebanyak 6 kali selalu dimenangkan oleh Golkar, sedangkan pada pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 4
Perbandingan Perolehan Suara Partai-Partai Islam dan Partai-Partai Sekuler pada Pemilu
1999 Di Desa Jetak

PARTAI-PARTAI ISLAM

No	Partai	Jml h Sua ra	Prosent ase
1	PPP	282	13,11 %
2	PKB	58	2,69 %
3	PAN	210	9,76 %
4	PBB	5	0,23 %
5	PK	93	4,32 %
6	PNU	3	0,14 %
7	PP	6	0,28 %
8	PPIIM	9	0,42 %
9	PSII	1	0,05 %
10	PKU	1	0,05 %
11	KAM MI	21	0,98 %
12	UI	2	0,09 %
13	PAY	3	0,14 %
14	PIB	16	0,74 %
15	SUNI	0	0 %
16	PCD	3	0,14 %
17	PPMB	3	0,14 %
18	PSII 1905	2	0,09 %
19	PID	1	0,05 %
20	PUMI	2	0,09 %
Jumlah		721	33,52 %

PARTAI-PARTAI SEKULER

No	Partai	Jumla h Suara	Prosent e
1	PDI P	800	37,19 %
2	GOLKAR	518	24,08 %
3	PDKB	26	1,21 %
4	PKP	7	0,33 %
5	PDI	4	0,19 %
6	PBI	5	0,23 %
7	PDR	0	0 %
8	IPKI	2	0,09 %
9	PNI MM	11	0,51 %
10	PNI FM	10	0,47 %
11	PNI	18	0,84 %
12	KRISNA	3	0,14 %
13	PKD	3	0,14 %
14	PR	0	0 %
15	MKGR	1	0,05 %
16	PUDI	0	0 %
17	PBN	0	0 %
18	PKM	3	0,14 %
19	PND	3	0,14 %
20	PNBI	6	0,28 %
21	PADI	0	0 %
22	PRD	1	0,05 %
23	PPI	1	0,05 %
24	MURBA	2	0,09 %
25	SPSI	5	0,23 %
26	PARI	0	0 %
27	PSP	1	0,05 %
28	PILAR	0	0 %
Jumlah		1430	66,48 %

Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Getasan, Kabupaten Semarang, 1999

Adapun pada Pemilu 2004, yang diikuti oleh 24 kontestan partai dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahteraan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai-Partai Islam dan Partai-Partai Sekuler Pada Pemilu 2004 di Desa Jetak

PARTAI-PARTAI ISLAM

No	Partai	Jumlah Suara	Prosentase
1	PBB	20	0,82 %
2	PPP	320	13,05 %
3	PPNU	0	0 %
4	PAN	6	0,24 %
5	PKB	25	1,02 %
6	PKS	999	40,73 %
7	PBR	6	0,24 %
8	PSI	3	0,12 %
Jumlah		1379	56,22 %

PARTAI-PARTAI SEKULER

No	Partai	Jumlah Suara	Prosentase
1	PNIM	10	0,41 %
2	PBSD	0	0 %
3	PM	0	0 %
4	PPDK	2	0,08 %
5	PPIB	0	0 %
6	PNBK	129	5,26 %
7	PD	42	1,72 %
8	PKPI	25	1,02 %
9	PPDI	5	0,20 %
10	PKPB	18	0,73 %
11	PDIP	396	16,14 %
12	PDS	131	5,34 %
13	GOLKAR	311	12,68 %
14	PP PANCASILA	0	0 %
15	PPD	4	0,16 %
16	P. PELOPOR	1	0,04 %
Jumlah		1074	43,78 %

Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Getasan, Kabupaten Semarang, 2004

Dari perbandingan tabel hasil pemilu 1999 dan 2004 tersebut nampak adanya perubahan yang signifikan perolehan suara PKS. Tampilnya PKS sebagai salah satu partai pemenang di desa Jetak dengan tingkat pencapaian 4,32 % pada tahun 1999 dan 40,73 % pada Pemilu 2004, merupakan fenomena menarik. Dilihat dengan perspektif politik aliran fenomena tersebut menarik untuk diteliti, dengan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi kemenangan PKS yang secara ideologis masuk kategori partai Islam puritan bisa memenangkan di daerah yang mayoritas warganya abangan ?

2. Apakah yang dijadikan pertimbangan para pemilih dalam menetapkan pilihan dalam pemilu ?

B. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempermudah proses penelitian yang akan kita lakukan menurut Mely G. Tan dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat (Koentjaraningrat:1997, hal:24) ada delapan langkah yang bisa kita lakukan pertama pemilihan persoalan, kedua penentuan ruang lingkup penelitian, ketiga pemeriksaan tulisan yang bersangkutan, keempat perumusan kerangka teoritis, kelima penentuan konsep, enam perumusan hipotesa, ketujuh pemilihan metode pelaksanaan penelitian, dan kedelapan perencanaan sampling.

Pada umumnya, batas ruang lingkup penelitian menurut Mely G. Tan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan maksud dan perhatian peneliti, kedua bahan yang ada, ketiga asumsi dasar, serta keempat penelitian yang relevan. (Koentjaraningrat:1997, hal:29).

Dalam melakukan Ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah perilaku politik masyarakat desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada Pemilu 2004. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan mayoritas masyarakat desa Jetak memilih PKS pada Pemilu 2004, sehingga menjadikan partai tersebut sebagai partai pemenang? Walaupun penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, tetapi perlu dikaji relevansi konsep politik aliran dalam konteks Pemilu 2004 di Didesa Jetak, Kabupaten Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Mengetahui faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku pemilih di desa Jetak, Kabupaten Semarang.
2. Ingin mengetahui pertimbangan-pertimbangan para pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PKS di Desa Jetak pada khususnya, dan PKS Kabupaten Semarang pada umumnya, tentang langkah apa yang diperlukan untuk mengambil dan mempertahankan simpati masyarakat sehingga suaranya pada pemilu 2009 sembilan tetap sama atau bahkan mengalami peningkatan.

Selain itu penelitian ini menjadi bahan koreksi bagi partai politik, mengapa mereka ditinggalkan para pemilih khususnya Desa Jetak, serta masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

E.1 Pendekatan

Sebagai penelitian kualitatif, studi ini tidak menguji hipotesis secara statistik, tetapi menyelidiki, mengidentifikasi, atau menganalisis data yang ada dan mencari pilihan-pilihan yang tepat. Seperti yang diyakini para sarjana, bahwa peneliti tidak selalu membutuhkan hipotesis. Studi ini juga tidak memiliki hipotesis sebagai acuan. Dalam hal ini Bouman (1996:34) berpendapat bahwa sebuah hipotesis tidak selalu menjadi acuan terbaik dalam penelitian. Bouman menambahkan, bahwa dalam penelitian kualitatif yang dilakukan adalah mencari tahu apa yang terjadi dalam sebuah situasi. Lebih dari itu, seperti yang dijelaskan oleh Dooley (1984:274), penelitian kualitatif dalam tradisi subyektif lebih bersifat deskriptif dari pada bersifat kausal dan cenderung lebih terfokus pada pengamatan kepada tokoh-tokoh tertentu dari pada generalisasi terhadap populasi yang lebih luas, dan oleh karena itulah maka penelitian tersebut tidak memerlukan sebuah hipotesis. Riset ini difokuskan pada sikap dan perilaku politik masyarakat yang bebrudaya abangan pada pemilu 2004. Pada saat yang sama, riset ini juga berusaha untuk mengklarifikasi, mengidentifikasi dan menganalisis beberapa aspek yang menjadikan PKS muncul sebagai partai yang dominan di desa Jetak. Untuk tujuan tersebut, selain menggunakan data dokumenter sebagai yang utama, interview dan percakapan langsung dengan masyarakat, juga akan dilakukan dengan para informan kunci yang saling berhubungan

sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam hal ini Ragin (1994:91) menambahkan bahwa :

”Riset kualitatif sangat baik untuk mempelajari situasi sosial pada seseorang atau interaksi seseorang yang bisa dilakukan dengan observasi partisipan, interview pribadi, studi kerja lapangan, dan ethnografi”

Sebagai salah satu teknik riset kualitatif, interview pribadi dianggap sebagai yang paling menonjol dan metode survey yang paling bernilai. Penyelidikan langsung dengan interview pribadi lebih dapat dipercaya atau reliabel di hampir semua topik survey dibandingkan dengan dokumen dan observasi..

E.2 Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan wawancara kepada responden dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban responden seputar perubahan sikapnya terhadap partai politik khususnya PKS. Responden dipilih dengan teknik *purposive sample*, yang artinya berdasarkan syarat tertentu yaitu responden yang pada pemilu 1999 memilih selain PKS dan selanjutnya pada pemilu 2004 memilih PKS dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas responden.

E.3 Metode Pengumpulan Data

Ada berbagai macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, akan tetapi yang paling sering dipakai adalah pengamatan berperanserta (*participation observation*). (Hendrarso, 1999:208)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum dan pada saat pengumpulan data, seperti mencari *key informan* yang akan dijadikan sumber informasi tentang mereka yang akan diteliti, menjalin hubungan baik dengan mereka dan mengadakan pendekatan, serta menciptakan suasana yang ”enak” sebelum memulai suatu wawancara. (Hendrarso, 1999 : 208).

Cara yang paling mudah bagi peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan informan adalah dengan cara membina dan menciptakan persamaan-persamaan dengan informan.

Metode kualitatif memungkinkan dapat mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal tersebut disamping dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu kasus, juga mampu mengurangi kemungkinan generalisasi (Oetomo, 1999:153). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode *wawancara mendalam dan pengamatan terlibat*, sebagaimana dalam penelitian kualitatif pada umumnya.

Dalam melakukan wawancara mendalam akan bersifat terbuka, tidak akan memperlakukan informan semata-mata sebagai mesin pemberi data, dengan pendekatan terbuka, para informan akan lebih terbuka tentang dirinya, tentang permasalahannya, kebutuhannya, pandangan, dan aspirasinya tentang suatu hal. Wawancara mendalam dan terbuka dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang pilihan politik mereka pada pemilu 2004, alasan-alasan mereka menjatuhkan pilihan kepada PKS pada pemilu tersebut.

Agar memperoleh gambaran dan informasi yang mendalam, terbuka dan obyektif, maka wawancara dilakukan dengan sebebas-bebasnya, sehingga responden akan lebih leluasa dalam memberikan informasi dan jawabannya. Disamping itu agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan, peneliti akan menelusuri literatur-literatur tentang partai politik, budaya politik dan lain-lain. Pada waktu yang sama juga akan digunakan metode observasi (pengamatan), karena melalui observasi akan mampu mengungkap makna di balik peristiwa/gejala yang dibutuhkan.

E.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memberi arti pada beratus-ratus bahkan beribu-ribu lembar catatan pernyataan dan perilaku dalam catatan-catatan penelitian. dengan demikian analisis data merupakan proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dari gagasan tersebut didukung oleh data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengatur transkrip interview, catatan lapangan, dan materi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang subyek penelitian dan memungkinkan penyampaian penelitian kepada orang lain. dengan demikian dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan oleh Zamroni (1992:88) menganalisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesis diantara data, mencari pola-pola hubungan, atau interaksi di antara data, menemukan mana-mana yang penting, yang harus didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan, serta diinformasikan kepada masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan dengan proses penelitian yang berkesinambungan, sehingga pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pada saat data dikumpulkan, diupayakan dapat mengelola data dan melakukan analisis data secara bersamaan. sebaliknya, pada saat menganalisis data tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi ke lapangan guna memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan kemudian mengolah kembali.

Proses analisis data kualitatif ini pada dasarnya didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi oleh peneliti. Proses ini terdiri dari tiga bagian, yaitu penyederhanaan, penyajian, dan verifikasi/penyimpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dimulai, selama proses pengumpulan data dan setelah meninggalkan lapangan penelitian. Meskipun analisis data telah dilakukan, peneliti bisa kembali lagi untuk memperoleh data tambahan secukupnya, kemudian dianalisis lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah Lahirnya Partai Politik

Sejarah awal lahirnya partai politik bisai dipisah menjadi dua karakteristik umum yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir ekstraparlemen.

Di Inggris dan Perancis, kegiatan politik boleh dikatakan sangat terinspirasi oleh model pemilihan yang cenderung aristokrasi, karena sistem pemerintahan yang menganut paham monarki. Para petinggi kerajaan, setelah hak pilih mulai mendapat ruang segar, lambat laun muali memberanikan diri membentuk panitia-panitia pemilihan. Dan hal itu dilakukan dari dalam parlemen ke ekstraparlemen. Interaksi antara petinggi kerajaan (sebagai politisi parlementer) dengan panitia-panitia pemilihan diluar parlemen berjalan sangat harmonis. Mereka saling bekerjasama menggalang dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Lahirnya partai politik yang berembrio dari dalam parlemen seperti disebutkan diatas bersifat *pratonage party* (partai perlindungan) serta cenderung tidak mempunyai disiplin administrasi yang rumit dan ketat (Miriam Budiarjo).

Selanjutnya, sejarah perjalanan partai politik di Barat mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Partai politik mulai dibentuk bukan atas permainan strereotipe para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Partai-partai tersebut bersandar pada suatu pandangan ideologis tertentu seperti sosialisme, kristen demokrat, dan sebagainya. Berbeda dengan karakter pertama, partai semacam ini mempunyai aturan kuat dan pimpinannya lebih terpusat.

Secara historigrafis, ide dasar untuk membentuk partai politik sudah menunjukkan indikasi pada era *renaissance* dan *aufklarung*. Manakala kekuasaan raja dikecam dan mulai dibatasi,

sebenarnya keinginan untuk membentuk partai-partai politik sudah mulai bermunculan. Terlebih-lebih hak pilih sudah diberikan secara luas.

Setelah wacana perluasan hak-hak politik bagi rakyat semakin meningkat dengan pesat itulah, partai politik seakan-akan telah lahir dengan sendirinya secara spontan. Apalagi, keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada waktu itu sudah dianggap sebagai urgen dan mendesak. Maka sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat, diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antara keduanya. Sedangkan kendaraan politik yang dimaksud adalah partai politik.

2. Budaya Politik

Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara kekal dengan suatu sistem politik tertentu. Budaya politik sangat luas lingkupnya terutama bila subkulture juga ikut dibahas. Namun budaya politik dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Budaya politik parokial
2. Budaya politik kaula
3. Budaya politik partisipan

Berdasarkan klarifikasi budaya politik parokial (artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya provinsi). Dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering melakukan perannya serempak dalam peranannya dibidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya defferensiasi tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri; dapat diambil sebagai contoh pemimpin tribe yang sekaligus mengemban beberapa peranan dalam masyarakat. Pada kebudayaan seperti ini anggota masyarakat cenderung

tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu yaitu tempat dimana ia terikat secara sempit (Bambang Cipto;2000,5).

Keadaan yang mutlak, dimana anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik secara sepenuhnya (kecuali terhadap obyek-obyek dalam skala kecil sekali), memang tidak akan pernah ada. Yang nyata-nyata menonjol dalam budaya politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya.

Yang kedua adalah budaya politik kaula, yaitu dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya. Sedangkan perhatian (yang frekwensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadaran sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap obyek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem, oleh karena itu menyerah saja pada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya. Segala keputusan (dalam arti output) yang diambil oleh pemeran politik (dalam arti pemangku jabatan politik) dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditantang. Tiada jalan lain baginya kecuali menerima sistem sebagai apa adanya, patuh, setia dan mengikuti segala instruksi dan anjuran pemimpin (politiknya).

Yang ketiga adalah budaya politik partisipan yang ditandai oleh adanya perilaku yang berbeda dengan perilaku sebagai kaula. Seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan

tanggung jawabnya (kewajibannya) dan dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggungg kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk (*taklid*) terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena tercakupnya aliran input dan aliran output, ia sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapapun kecilnya.

Kritisme penilaian terhadap sistem politik terlihat dalam semua bidang. Karena itu kalau ada penerimaan terhadap sistem politik, penerimaan itu harus dinilai seperti sebenarnya, dan demikian pula sebaliknya.

Sebenarnya sangat sulit untuk menentukan indentifikasi budaya politik Indonesia, karera atributnya kurang jelas. Akan tetapi satu hal yang barangkali dapat dijadikan titik tolak untuk membicarakan masalah ini adalah adanya pola budaya yang dominan., yang berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, misalnya etnis jawa. Menurut analisis Anderson, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda sekali dengan yang dipahami oleh masyarakat barat. Karena, bagi masyarakat jawa, kekuasaan pada dasarnya bersifat *konkret*, *besarannya konstan*, *sumbernya homogen*, dan *tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi*. Hal ini berbeda dengan masyarakat barat, dimana kekuasaan itu bersifat seperti *abstrak* dan berasal dari berbagai sumber.

Implikasi dari pola pemilahan seperti ini adalah, kalangan birokrat seringkali menampilkan diri dengan *self image* atau citra diri yang bersifat *benevolent*, yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, sebagai pamong atau guru/pendidik bagi rakyatnya. Kalangan pengusaha harus menampilkan diri sebagai kelompok yang pemurah,

baik hati, dan pelindung dari seluruh rakyat. Akan tetapi sebaliknya, kalangan penguasa memiliki persepsi yang merendahkan rakyatnya (Bambang Cipto dalam Partai, Kekuasaan dan Militerisme;2000;19).

Ada implikasi negatif dari citra-diri seperti kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan domain atau kompetensi sekelompok kecil elite yang ada di Jakarta atau ibukota propinsi. Yang membentuk agenda publik, juga menformulasikan kebijakan publik adalah kalangan pemerintah, baru kemudian disesuaikan dan disahkan oleh DPR. Rakyat mengalami proses alienasi, bahkan tersisihkan oleh proses politik. Hampir semua undang-undang dan peraturan pemerintah dibentuk melalui proses seperti itu. Dan lebih menarik lagi untuk diperbincangkan adalah berapa banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang tersebut kemudian harus diwujudkan dengan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, sampai tingkat pemerintahan yang lebih rendah melalui Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan *Patronage*, baik dikalangan penguasa maupun masyarakat, yang didasarkan pada *Patronage*. atau oleh James Scott (1976) disebut pola hubungan *Patron-Client*

Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual, antara dua individu, yaitu si *Patron* dan si *Client*, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelaihora selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut. Kecenderungan *patronage* ini ditemukan secara meluas, baik dalam lingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat. Kalangan politik juga ditemukan gejala yang sama. Seorang gubernur yang menjadi ketua dewan

pertimbangan Golongan Karya, dapat menjadi *patron* bagi sejumlah politisi, kemudian menjadi pengurus Golkar, dan akhirnya menjadi anggota DPRD Tingkat I. Demikian pula hubungan antara Bupati dengan pengurus Golkar Tingkat II, yang kemudian menjadi anggota DPRD Tingkat II. Dikalangan partai politik yang lain juga terjadi hal yang sama,

Salah satu kecenderungan yang dapat kita amati perpolitikan Indonesia adalah sebuah kecenderungan akan munculnya budaya politik yang bersifat *Neo Patrimonialistik*. Harold Crouh (1979) telah mengungkapkan beberapa waktu yang lalu, menurut hemat saya masih relevan untuk kontek kehidupan politik Indonesia sekarang ini. Dikatakan sebagai *Neo Patrimonialistik*, karena negara memiliki atribut yang modern dan rasionalistik, seperti birokrasi tetapi juga memiliki atribut yang bersifat patrimonialistik. Dalam negara patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan dan kekuatan militer berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara, yang mempersepsikan segala sesuatunya mempribadi. Pada masa lampau di Eropa dukungan terhadap penguasa yang patrimonialistik diperoleh bukan dari kalangan aristokrasi, tetapi berasal dari kalangan budak dan tentara bayaran, yang secara langsung dikuasai oleh penguasa.

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu akan dalam negara akan memberikan norma, sistem keyakinan dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya. ada dua alasan utama mengapa pendidikan politik di Indonesia tidak memberi peluang cukup untuk memunculkan *civil society*

Pertama dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib anak merupakan domain dari orang dewasa, anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan untuk masuk sekolah atau universitas banyak

ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Hal ini berbeda sekali di Barat, anak diajarkan untuk mandiri dan dilibatkan dalam diskusi menyangkut hal-hal tertentu.

Kedua tingkat politisi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Kalangan keluarga miskin, petani, buruh dan lain sebagainya., sehingga tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi karena lebih terpaku pada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Oleh karena itu tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tahap kognitif, bukan menyangkut dimensi yang bersifat evaluatif.

Ketiga setiap individu yang berhubungan langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak mereka, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika diamati pendidikan politik kita lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara.

3. Aliran Pemikiran Partai di Indonesia

Kajian dan penelitian tentang aliran pemikiran partai di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para penulis. Beberapa tulisan yang relevan dengan tema penelitian ini adalah : pertama, tulisan Herbert Feit dan Lance Castles (eds), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3S, Jakarta, 1988. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa ada dua sumber pemikiran politik di Indonesia, pertama yang bersumber dari tradisi, dan kedua bersumber dari pemikiran barat. Kedua sumber tersebut pada gilirannya menghasilkan lima aliran politik di Indonesia. Kelima aliran pemikiran tersebut adalah: **pertama**, komunisme, yang mengambil konsep-konsepnya langsung atau tidak langsung dari barat, yaitu dari pemikiran-pemikiran Marx dan Lenin. Sebagai sebuah pilihan perjuangan, komunisme mempunyai wadah politik yakni Partai Komunis Indonesia (PKI), yang didirikan pada 23 Mei 1920. Gebrakan PKI adalah ketika mereka

melakukan pemberontakan pertama tahun 1926 yang kemudian secara berturut-turut disusul pemberontakan tahun 1927 yang hampir merata di berbagai daerah.

Usaha PKI untuk mengepakkan sayap pengaruhnya di Indonesia terus dilakukan, maka terjadilah pemberontakan Madiun tahun 1928, dan Gerakan 30 September 1965. Drama pemberontakan yang terakhir ini masih menyisakan kontroversi bagi para pemerhati sejarah. Hal ini sangat terkait dengan proses pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Kedua, Sosialisme Demokratik (*democratic socialism*), mengambil bentuk konkret dalam partai sosialis yang dalam wujud formalnya muncul dengan Partai Sosialis Indonesia. Meskipun partai ini kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang besar dalam perpolitikan Indonesia, karena kebanyakan pendukungnya dari kalangan menengah ke atas dan umumnya berpendidikan tinggi. Salah satu ciri sosialisme demokrat yang menonjol adalah sifatnya yang terbuka terhadap kebudayaan barat. Hal ini bisa dipahami, karena tokoh terpenting ideologi ini, Soetan Sjahrir, adalah figur yang beberapa kali keluar negeri dalam kepentingan menimba pengalaman. Bahkan tulisannya tentang nasionalisme dan internasionalisme pernah dipresentasikan pada Konferensi Sosialis Asia yang pertama di Birma tahun 1953 (Koirudin, 2004:37). Pada tingkat tertentu ideologi sosialisme demokrat ini juga memberi pengaruh pada partai-partai lain, terutama Masyumi dan PNI.

Ketiga, Islam, yang terbagi menjadi kelompok agama politik di bawah kaum reformis yang berpusat pada partai Masyumi, dan yang konservatif yang berpusat pada Nadlatul Ulama (NU). Dalam sejarahnya, kelompok umat Islam cenderung menetapkan pilihan perjuangan melalui saluran konstitusional dengan harapan bisa memenangkan dalam percaturan di konstituante. Sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, hampir tidak ada ruang sejarah yang bebas dari pengaruh Islam. Pada era Demokrasi Liberal, tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir,

Syafrudin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan lain-lain adalah figur-figur kelompok ideologi Islam yang pada jamannya sangat menentukan terhadap jalannya sejarah perpolitikan di Indonesia.

Keempat, Nasionalisme Radikal, ia berkolaborasi dengan tradisionalisme Jawa, Komunisme, dan Sosialisme Demokratik yang kemudian mengambil bentuk konkrit Partai Nasional Indonesia (PNI). Ideologi ini sesungguhnya bersumber dari “nasionalisme polos” yang mulai berkembang pada era perjuangan merebut kemerdekaan. Pada era pasca kemerdekaan, Soekarno, sebagai figur terpenting ideologi ini menyusun *platform* yang dituangkan dalam manifestasi dasar tujuan-tujuan PNI, yang populer disebut dengan istilah gerakan masa marhaen. Menurutnyanya massa marhaen adalah massa yang *sama rata sama rasa bahagia* dan tidak diperbolehkan saling menindas. Pemikiran Soekarno yang paling spektakuler, sebagai kejayaan aliran nasionalisme radikal adalah gagasannya tentang kompromi tiga ideologis, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis (nasakom).

Kelima, Tradisionalisme Jawa, penganut ideologi ini dianggap unik karena mereka tidak berhasil memanifestasikan diri dalam bentuk partai politik yang konkrit walaupun memiliki pendukung dalam jumlah yang besar. Walaupun mereka tidak memiliki partai politik yang mandiri, tetapi para pendukung ideologi tersebut mengalami penyebaran ke berbagai partai politik yang ada.

Dalam dataran realitas politik, kelima aliran pemikiran tersebut di atas memiliki titik singgung antara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu-satunya yang tidak ada titik singgung yang langsung adalah antara Islam dengan Komunisme.

Tulisan lain yang relevan dengan tema ini adalah buku karya Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: CV Rajawali, 1983). Dalam

buku tersebut dikatakan bahwa munculnya partai politik di Indonesia merupakan wahana aktualisasi tiga aliran pemikiran, yaitu Islam, Nasionalisme, dan Marxisme/Sosialisme. Aliran pertama ditandai dengan lahirnya Serikat Islam (SI). Pada mulanya, organisasi yang didirikan oleh H Samanhudi di Solo pada tahun 1911 ini lebih bersifat perkumpulan dagang semata. Di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto organisasi ini berkembang dengan pesat, bahkan berhasil mengokohkan diri sebagai organisasi yang paling populer. Salah satu aspek yang menarik simpati rakyat bagi SI adalah keberhasilannya dalam mengidentifikasi diri sebagai satu-satunya partai yang membawa misi dan aspirasi politik bimu putera untuk perjuangan kemerdekaan.

Aliran kedua ialah Marxisme/Sosialisme yang menjadi lokomotif penyebar pandangan tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1920. Tokoh-tokoh yang ikut membidani kelahiran PKI semula merupakan para pimpinan SI, seperti Semaun dan Darsono. Sebagai salah satu partai yang besar pada eranya, PKI tercatat beberapa kali melakukan pemberontakan di daerah-daerah, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Hal inilah yang menyebabkan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tanggal 23 Maret 1928, bahkan puluhan ribu anggotanya dibuang ke Boven Digul. Di era pasca kemerdekaan, PKI tampil sebagai partai besar selain PNI, Masyumi, dan NU. PKI kembali melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948, dan pada tahun 1965 PKI dituduh melakukan makar terhadap NKRI.

Aliran ketiga, dapat dilihat dengan munculnya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Partai ini mengaptasi Marhaenisme yang dijadikan sebagai asas utamanya. Sebagai partai yang berbasis nasionalisme yang pertama, PNI juga cepat meraih dukungan rakyat, karena salah satu tujuannya adalah mencapai kemerdekaan dari

penjajah Belanda. Pada era demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, PNI juga muncul sebagai salah satu partai besar.

Tulisan lain yang relevan dengan tema penelitian ini adalah karya seorang antropolog Clifford Geertz dalam *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Pustaka Jaya, Jakarta, 1981). Karya tentang perilaku politik masyarakat Indonesia, khususnya Jawa tersebut mengambil lokasi penelitian di Mojokuto (Pare), Jawa Timur. Walaupun karya Geertz tersebut lebih dekat dengan disiplin antropologi, tetapi sumbangannya terhadap ilmu politik sangat berarti. Penggolongan atas orang Jawa yang terdiri atas santri, abangan dan priyayi, walaupun banyak mengundang kritik, tetapi tetap merupakan referensi yang monumental. Teori yang dibangunnya memiliki pengaruh yang besar bagi tradisi keilmuan sosial di Indonesia. Hampir setiap penelitian yang serius tentang Jawa masih merujuk karya tersebut panjang lebar.

Dalam kajian tersebut, Geertz dengan jelas menggambarkan bahwa baik santri, abangan maupun priyayi semuanya mengaku sebagai muslim. Menurut Geertz hanya santrilah yang menjalankan ajaran agama secara baik Abangan, walaupun mereka juga beragama Islam, tetapi tidak mengamalkan perintah agamanya, sedangkan priyayi adalah mereka yang berasal dari keturunan kraton atau golongan "terhormat". Kedua terakhir inilah yang pada pemilu umum tahun 1955 membesarkan suara PNI dan PKI. Dalam karya inilah Geertz memperkenalkan kepada komunitas ilmu politik tentang politik aliran. Ia mengatakan bahwa pengelompokan politik di Indonesia terjadi mengikuti kesamaan orientasi budaya, yaitu ikatan sekelompok orang kepada *dominant culture* dalam kelompoknya (Kamaruddin, 2003 : 49).

Aliran, mewakili sejenis organisasi sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial tertentu yang terjadi pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan. Setiap kelompok dengan agregasi perkumpulan-perkumpulan khusus memberikan kerangka umum

dimana rangkaian besar kegiatan sosial apat diorganisasikan. Dengan demikian, keterikatan primordial merupakan keterikatan dasar asli dari pengelompokkan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang kemudian meletakkan dasar bagi transformasi lebih lanjut ke dalam unit-unit sosial yang lebih besar. Aliran, dalam hubungan ini adalah perwujudan akhir dari transformasi ikatan itu (Al Chaidar, 1419 : 19).

4. PERILAKU PEMILIH DI INDONESIA

Studi mengenai perilaku pemilih dapat dikelompokkan menjadi tiga model, yakni model sosiologi, model psikologis dan model ekonomi politik (lingkaran Survey Indonesia : Oktober 2007)

Model Sosiologi, dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis oleh para pemilih terutama kelas sosial, agama dan kelompok etnis/kedaerahan. Model Psikologis, dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan faktor-faktor psikologis yakni kedekatan, perasaan, keterlibatan dan sikap seseorang terhadap objek (partai/tokoh). Faktor-faktor psikologis partisanship/identifikasi partai dan menurut Dee Allsport dan Herbert F. Weisberg bahwa sikap partisanship ini tidak akan berubah jangka waktu yang lama karena dekatnya ikatan emosional (1984). William G. Jacoby (1986) menyatakan bahwa partisanship merupakan dasar bagi individu untuk melakukan pemilihan terhadap isu yang diusung partai jadu menurut Jacoby, partisanship mengarahkan pemilih bagaimana menilai isu yang ditawarkan oleh suatu partai. Individu membangun suatu kesadaran sebagai hasil dari proses sosialisasi, kesadaran itu yang dipakai untuk memahami peristiwa dalam kerangka yang dipunyai individu. Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, ditempat kerja dan dilingkungan masyarakat dimana seseorang bertempat tinggal membantu proses pembentukan identitas partai ini. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dimana sebuah partai politik disikapi secara positif akan menumbuhkan sikap positif juga terhadap partai tersebut. orang tua mendukung partai tertentu akan cenderung menumbuhkan sikap partisan pada anggota keluarga lainnya.

Jadi faktor psikologis ini antara lain, tingkat kedekatan dengan partai, kedekatan dengan pemimpin, *patron klien* (khas Indonesia), informal dan faktual leader, *opinion leader* (orang yang dihormati) dan sebagainya.

Model ekonomi politik, model ini menekankan pada penilaian rasional pemilih. Model ini lebih menekankan betapa pentingnya evaluasi pemilih terhadap partai/calon pemimpin yang bersaing dalam pemilu. Pertimbangan rasional ini ternyata isu ekonomi merupakan pertimbangan utama dan merupakan masalah yang penting bagi pemilih. Partai/calon yang dianggap mampu menyelesaikan masalah ekonomi lebih mungkin untuk dipilih sehingga pilihan dari waktu ke waktu bisa berubah-ubah. Para pemilih melakukan kalkulasi politik dan ekonomi (yaitu memperhitungkan dengan analisis terhadap dampak yang akan diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemilih dimasa yang akan datang dari masing-masing kandidat. Jadi pemilihan seseorang atas kandidat tertentu didasarkan pada pertimbangan rasional terutama kemampuan dalam mengatasi dan menangani masalah ekonomi.

Menurut Warsito dari berbagai survey dan hasil pilkada di Jawa Tengah memberi gambaran adanya perubahan perilaku memilih dari masa orde baru ke orde reformasi, meskipun membandingkan orde baru dengan orde reformasi sebenarnya kurang tepat jika didasari sistem politik yang berlaku tetapi dari sisi pragmatis dan realitas kehidupan politik dapat dijadikan acuan. Pada masa orde baru perilaku memilih mayoritas cenderung pada model psikologis, meskipun terdapat muatan mobilisasi dan intimidasi dan sebagian dengan pendekatan sosiologi dan sangat sedikit perilaku pemilih yang rasional atau model ekonomi politik

Pada masa reformasi menunjukkan perubahan semakin meningkatnya perilaku pemilih yang rasional atau model ekonomi politik dan pendekatan model sosiologis, sedangkan pendekatan psikologis semakin menurun. Disamping itu ada fenomena baru yaitu banyaknya "*swing voter*", didasarkan pada hasil pilkada Kabupaten Kota di Jawa Tengah bahkan hampir di seluruh Indonesia, menggambarkan bahwa peta pemilih sebagai berikut :

1. Kelompok memilih golput/tidak memilih antara 30 % - 40 %.
2. Kelompok yang sudah mempunyai pemilih tetap antara 25 %-30%.
3. Kelompok "*Swing voter*" atau masa mengambang antara 30 %-40%.

Mereka memilih Golput itu mayoritas adalah pemilih yang rasional karena mempunyai evaluatif untuk mempertimbangkan dampak baik terhadap dirinya maupun masyarakat yang

sudah mempunyai pilihan tetap, mereka sebagian karena pertimbangan sosiologis (agama, etnis dan primordial lainnya) dan sebagian karena faktor kedekatan dengan partai atau kandidat, kesetiaan sebagai kader partai atau aktifis partai). Kelompok "*swing voter*" ini adalah pemilih kunci bagi kandidat, artinya siapa yang dapat mempengaruhi mereka maka dia akan memenangkan pemilihan, disinilah pentingnya kandidat untuk mengetahui kantong-kantong "*swing voter*" untuk dipengaruhi sebagai pemilihnya. Mereka biasanya dapat dipengaruhi untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan pragmatis yang langsung dirasakan seperti "*money Politics*", kaos, pavingisasi, dan sebagainya. Menurut Warsito kelompok ini dapat di klasifikasikan sebagai pemilih yang rasional, meskipun dalam lingkup sempit dan jangka pendek (Debatebel) (Warsito, Makalah Diskusi Studi Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Jateng;2008;3)..

Gambaran tersebut memberikan harapan demokrasi Indonesia kedepan. Maksudnya apabila keadaan tersebut diikuti dengan modernisasi partai politik maka kita akan memperoleh pemimpin-pemimpin yang handal untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN DESA JETAK

A. Sejarah dan Kiprah PKS

Pengaruh pemikiran politik dunia terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan (Feith, 1988:39). Pengaruh tersebut dapat dirasakan semenjak bangkitnya nasionalisme pada pertengahan tahun 1900-1910, yang dalam hal itu dipelopori oleh komunitas cendekiawan muda. Tepatnya tanggal 20 Mei 1908, Dr Soetomo dan teman-temannya berhasil membentuk sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo.

Semenjak berdirinya Budi Utomo itulah, dinamika pergerakan nasional berkembang sangat pesat. Pada permulaan berdiri, perkumpulan semacam budi utomo tersebut hanya berkembang dalam lingkaran pemuda dan kaum terpelajar dan bentuk *study club*. Lantas dalam pertumbuhan berikutnya, perkumpulan tersebut berubah menjadi organisasi massa dan partai-partai yang didukung oleh petani dan golongan buruh.

Kondisi bangsa Indonesia seharusnya menjadi lebih baik setelah bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 agustus tahun 1945 lalu. Tapi selama puluhan tahun indonesia merdeka, ternyata tidak banyak yang banyak kita lakukan. Selama berpuluh-puluh tahun itu pula, kita justru banyak didera persoalan dalam negeri yang tidak kunjung ditemukan solusi yang terbaik. Lima pergantian kepemimpinan nasional, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur dan Megawati bangsa ini sulit mengalami perkembangan yang berarti. Perubahan yang terjadi sampai sekarang, justru membawa kita kepada persoalan kebangsaan yang semakin rumit dan pelik. Pada masa pergerakan nasional dimana tantangan yang ada adalah merebut kemerdekaan, kita dihadapkan pada musuh tunggal. Solusinya sangat

jelas yaitu mengangkat senjata. Namun sekarang yang kita hadapi banyak permasalahan, apa solusi yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengatasi masalah?

Menurut Mohtar Masoed dalam Perbandingan Sistem Politik disebutkan bahwa dinamika pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran dan gerakan politik di dunia Islam, khususnya timur Tengah. Bagaimana pengaruh pemikiran dan gerakan politik itu berlangsung, ditentukan oleh beberapa faktor.

Pertama, di Indonesia selama era orde baru, potensi umat yang besar dalam gerakan politik tidak sepenuhnya dapat diakomodir ke dalam organisasi Islam yang ada, seperti Muhammadiyah atau NU. Sebagian terbesar umat di Indonesia justru tidak menjadikan Muhammadiyah atau NU sebagai wadah untuk mewujudkan gerakan politik. Ini karena adanya realitas obyektid yang tak terbantahkan bahwa dua organisasi besar itu bukan partai politik, melainkan organisasi sosial keagamaan. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam sejak paruh pertama dekade 1970-an ternyata tak dapat memainkan peran agregasi dan artikulasi umat islam akibat terlalu kuatnya otoritarianisme kekuasaan rezim Soeharto.

Kedua, ketika aspirasi politik umat semakin besar, maka ada kebutuhan yang semakin besar pula untuk menemukan format gerakan Islam politik pada referensi-referensi tertentu. Pada giliran selanjutnya, pemikiran politik yang datang dari dunia luar sangat mudah berfungsi sebagai referensi terbentuknya gerakan politik Islam di Indonesia. Sebagaimana muncul di kota-kota besar Indonesia selama dasawarsa 1980-an, proses ke arah “Islamisasi” sosiokultural marak terjadi, yang ditandai oleh perkembangan dakwah di perkantoran, Kawasan-kawasan bisnis dan di daerah elit serta semarak pengkajian Islam di kampus-kampus perguruan tinggi. Dalam situasi

seperti itulah berlangsung penyebaran pemikiran politik Islam dari dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dengan akselerasi yang cukup besar.

Ketiga, upaya pencarian referensi gerakan politik ke arah pemikiran yang berkembang di dunia Islam itu semakin didorong oleh kondisi dalam negeri yang sangat kritis dibawah bayang-bayang kekuasaan rezim Soeharto yang otoriter. Kalau kita menengok pada situasi politik selama 1980-1990, hubungan antara umat Islam dan pemerintah tidak harmonis. bahkan timbul perseteruan panjang yang diwarnai bentrokan yang meminta korban. Hampir semua kelompok dalam Islam mengalami “pengasingan’ di negerinya sendiri.

Tiga hal ini kemudian membentuk sebuah persenyawaan yang mempertegas besarnya perhatian Islam politik di Indonesia terhadap pemikiran dan gerakan Islam di timur Tengah atau dunia Islam pada umumnya. Inilah yang dapat dipahami dari apa yang pernah ditulis M. Amien Rais bahwa tanpa bisa dielakkan lalu muncul atmosfer yang menyebabkan begitu mudahnya pemikiran revolusioner Al-ikhwan A-Muslimun di Mesir, dengan Hasan Al-Banna sebagai tokoh besarnya, memperoleh persemaian subur di Indonesia.

Selanjutnya meskipun tidak selalu berada dalam format hubungan sebab akibat yang dapat dibaca secara gamblang, ada resonansi tertentu dari pemikiran dan gerakan Islam di Timur Tengah terhadap pemikiran dan gerakan Islam di indonesia. Merupakan sebuah kekeliruan besar atau amat fatal jika menyebut tradisi Islam di Nusantara tidak mempunyai kaitan dengan Islam di Timur Tengah. Dalam konteks ini, pengaruh pemikiran dan gerakan politik Islam di Timur Tengah terhadap pemikiran dan gerakan politik Islam di indonesia acapkali bersifat kualitatif. Khusus pemikiran tentang hubungan antra Islam dan politik di Indonesia, tak dapat diabaikan posisi pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun serta pengaruh dan reformulasinya dalam pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia.

Secara substansial, pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun tentang Islam dan politik atau antara agama dan negara dilandaskan pada argumen bahwa seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia seorang politisi, memiliki jangkauan pandangan yang jauh kedepan dan mempunyai kepedulian yang besar kepada kepentingan umat. dengan demikian, persoalan politik bukanlah semata wilayah pribadi umat Islam, melainkan kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang harus dipikul secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tegaknya kemaslahatan. Pada tataran epitemologi, inilah yang disebut *fiqih siyasah*. Dengan demikian, politik dalam perspektif Al-Banna adalah rekonstruksi problema keumatan untuk kemudian dijadikan *civic education* ke tengah-tengah masyarakat. Politik menurut Al-Banna tidak berada di alam maya namun nyata berhubungan dengan masalah umat, di sini dan sekarang juga. (Yusuf Qordhowi: Umat Islam Menyongsong Abab 21; 2001;27)

Jejak-jejak pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam gerakan politik Islam di Indonesia terutama terkait dengan munculnya *usrah*, *halaqah* dan *tarbiyah* yang mengadopsi filisofi gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun di masjid-masjid perguruan tinggi di Indonesia. Ketika rezim Soeharto jatuh, pelebagaan dari pemikiran Hasan Al-Bannadan Sayyid Quthub dalam gerakan politik itu muncul pada Partai Keadilan yang dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Jakarta, pada hari Ahad, 9 Agustus 1998. Sehingga penting di catat disini, bahwa embrio kelahiran Partai Keadilan sudah ada sejak dekade 1980-an, yaitu dengan terbentuknya jaringan pengajian antar masjid kampus yang dikenal dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan menjelang runtuhnya kekuasaan Soeharto jaringan ini melahirkan gerakan baru yang bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

Bersamaan dengan munculnya liberalisme politik yang ditandai oleh pluralisme partai politik dengan membawa beragam ideologi dan strategi perjuangan, maka timbul keinginan

untuk mendirikan partai politik Islam dikalangan aktivis Islam kampus era 80-an. Untuk itu dilakukanlah sebuah survei terbatas di kalangan aktivis Islam kampus tentang perlu tidaknya mendirikan partai Islam untuk mewadahi aspirasi mereka di bidang politik. Hasilnya, 60 % lebih responden menyatakan setuju berdirinya partai Islam yang kemudian bernama Partai Keadilan.

Landasan filosofis berdirinya Partai Keadilan ialah manusia sebagai khalifah Allah di bumi tidak mungkin mengelak dari tanggung jawab melaksanakan misi khilafah, yaitu memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi melalui gerakan politik otentik. Filosofis ini berangkat dari pemahaman akan universalitas Islam, sebagaimana dirumuskan Hasan Al-Banna. Pemikiran Hasan Al-Banna yang dijadikan rujukan Partai Keadilan yang termaktub dalam filosofinya Partai Keadilan adalah sebagai berikut :

“Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar”.

Dengan demikian berarti, pendirian Partai Keadilan merupakan upaya memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dimensi-dimensi kehidupan manusia sekaligus menjadi cerminan aktualisasi universalitas Islam dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup. Partai politik merupakan sarana efektif dalam upaya mewujudkan sebuah struktur masyarakat muslim.

Kehadirannya sebagai Partai Politik di Indonesia ternyata mampu memberikan warna baru dari dunia politik nasional. Betapa tidak menurut Djony Edward dalam bukunya efek bola Salju Partai Keadilan Sejahtera ada beberapa hal yang mendasar yang menjadikan PKS sebagai entitas partai politik yang menarik. *Pertama*, partai yang tanggap akan permasalahan internasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya respon yang diberikan oleh PKS terkait masalah dunia islam serta

perdamaian dunia. Respon yang disuguhkan dengan sikap politik yang tegas misalnya melakukan aksi boikot produk yahudi dalam melawan gerakan penjajahan Israel terhadap negara Palestina, serta di wujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi yang santun namun tetap tajam. Sesuatu yang berbeda ditengah krisis kepercayaan diri bangsa untuk memberikan pendapat serta peranan dalam politik luar negeri maupun politik internasional. *Kedua*, Hadirnya PKS sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan beraninya PKS menjawab permasalahan utama bangsa berupa Kolusi Korupsi serta Nepotisme dengan perilaku politik yang jauh dari dunia KKN. Fenomena politik yang menurut Helvy Tiana Rosa dalam bukunya Bukan Dinegeri Dongeng disebut sebagai sebuah keajaiban yang terjadi dalam dunia politik. Sikap DPW Jawa Barat terhadap uang *kaduedueh*, Zuber Syafawi dalam mengungkap bagi-bagi aspirasi anggota dewan, serta konsistensi untuk tidak rangkap jabatan sejak awal partai ini menjadi penyejuk dalam kejenuhan politik bangsa ini. Ketiga, Kebersamaan PKS dengan masyarakat. Sejak bernama Partai Keadilan Sejahtera, nama PKS seolah tidak bisa dipisahkan dari aktifitas sosial kemasyarakatan. Kebersamaanya selama masyarakat Jakarta banjir, hadirnya mereka dalam rentetan bencana alam, sapaan akrab mereka dengan bakti sosial, pengobatan murah serta rangkaian aktifitas mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebuah komunikasi politik yang memunculkan simpati yang besar.

B. Fenomena PKS Jawa Tengah

B.1 Perkembangan Partai Keadilan (PK)

Partai Keadilan pada lingkup nasional dideklarasikan di halaman Masjid Al Ashar Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1998. Untuk wilayah Jawa Tengah, dengan beberapa kader yang sudah dimiliki, mulai menyiapkan proses lahirnya Partai Keadilan Jawa Tengah. Pembuatan atribut partai, penyiapan pengerahan massa dan pembentukan panitia deklarasi mulai dilakukan.

Kader Partai Keadilan di Jawa Tengah berkeinginan menyampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah bahwa telah lahir sebuah Partai Baru, Partai Dakwah, Partai Keadilan. Tepatnya pada tanggal 20 September 1998 di halaman Gedung Berlian (gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah), Partai Keadilan di Deklarasikan.

Struktur kepengurusan DPW Partai Keadilan Jawa Tengah 1998

Ketua : Zuber Safawi S.HI
Sekretaris : Imam Nur Azis, S.Sos
Bendahara : Abdul Kharis SE.A.Kt
Kaderisasi : Wahid Ahmadi
Kewanitaan : Diah Rahmawati.

Pada waktu yang sama dilantik pula Ketua Majelis Pertimbangan Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Jawa Tengah Agus Abdul Latif, SE dan Ketua Dewan Syariah Wilayah KH. Fauzan Anwar, Lc.

Pelantikan dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan DR. Nur Mahmudi Ismail, naskah deklarasi dibaca oleh ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Agus Abdul Latif, SE. Arahan oleh DR Salim Segaf Al Jufri dan ditutup doa oleh KH. Zaenal Mahmud.

Masa kepengurusan Partai Keadilan Jawa Tengah untuk yang kali pertama telah terbentuk, dan pekerjaan besar sudah menanti -yakni Pemilihan Umum pertama di masa reformasi- dengan demikian tidak ada lagi waktu untuk santai-santai.

Tepat pada tanggal 4 Juni 1999 Pemilihan Umum dilaksanakan. Partai Keadilan sebagai salah satu peserta dengan nomor 24 diantara 48 peserta yang lain. Dan Alhamdulillah Partai Keadilan menduduki 7 besar dengan perolehan suara 137.770 suara dan menempatkan satu wakilnya di DPRD TK I Jawa Tengah dan 16 wakil di DPRD TK II di 16 Kabupaten/kota.

Seiring dengan perkembangan Partai Keadilan yang harus melakukan penataan-penataan pasca Pemilu, maka Partai Keadilan-pun menyelenggarakan MUNAS I yang diadakan pada tanggal 19-21 Mei 2000 di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa Barat. Hasilnya memberikan amanah kepada DR Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan menggantikan DR Nur Mahmudi Ismail M.Sc.

Namun sebelum penyelenggaraan MUNAS, Jawa Tengah terlebih dulu melakukan penyelarasan dengan menyelenggarakan MUSWIL I Partai Keadilan Jawa Tengah yang

diselenggarakan pada bulan Oktober 1999 secara sederhana di halaman belakang kantor DPW Partai Keadilan Jawa Tengah.

MUSWIL I Partai Keadilan ini menghasilkan kepengurusan dengan masa khidmat 1999 sampai dengan 2003.

Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Jawa Tengah periode 1999 – 2003

Ketua : Zuber Safawi, S.Hi.
Sekretaris : Arif Awaludin SH. M.Hum
Anggota : Drs H. Wahid Hasyim.

Susunan Pengurus Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Jawa Tengah periode 1999 – 2003

Ketua : KH. Ahmad Fauzan Anwar, LC
Sekretaris : Muhammad Afif, Lc.
Anggota : Anwar Jufri, Lc, H.Imam Syuhodo, Lc, dan Arwani Amin, Lc.

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Jawa Tengah periode 1999 – 2003

Ketua Umum : Muh. Haris, SS
Sekretaris Umum : Sri Praptono, S.Sos
Bendahara Umum : Abdul Kharis, SE.Akt.

dan dilengkapi dengan jajaran ketua deputy dan biro.

Mengawali masa khidmat ini DPW Partai Keadilan membuat peroidisasi sekaligus menunjukkan fokus dan arah prioritas program kerja.

Tahun 1420 H /1999 – 2000 M merupakan tahap Konsolidasi

Tahun 1421 H /2000 – 2001 M Merupakan tahap Sosialisasi

Tahun 1422 H /2001 – 2002 M Merupakan tahap Mobilisasi

Tahun 1423 H /2002 – 2003 M merupakan tahap Penggalangan

Rencana strategis ini selanjutnya disinergiskan dengan keputusan penting MUNAS I yang diselenggarakan bulan Mei 2000.

Berbagai dinamika mewarnai jalannya kepengurusan ini, dengan berbagai suka, duka, prestasi, kekurangan dan tantangan silih berganti. Hingga tiba saat menghadapi Undang Undang Pemilu yang menetapkan bahwa peserta pemilu 2004 adalah partai yang lolos

Electoral Threshold (ET) dengan perolehan suara minimal 2%, sedangkan Partai Keadilan tidak sampai pada 2%.

B.2 Prestasi Partai Keadilan

Dalam pemilu 1999 partai keadilan memperoleh 7 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, 21 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan sekitar 160 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. PK menduduki peringkat ke-7 diantara 48 partai peserta pemilu. Bahkan di Jakarta, sebuah kota barometer demokrasi Indonesia, Partai Keadilan mencapai peringkat kelima.

Hasil ini tidak besar, tetapi Kompas (20 Mei 2000) menilai PK adalah partai pemenang pemilu 1999. Bukan karena jumlah suara yang diraihnya namun karena prestasi yang dicatatnya di banding partai lain yang memiliki akar historis yang panjang, tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh dan dana yang kuat. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menyatakan bahwa PK adalah partai pemenang pemilu 1999 yang diikuti hanya oleh partai baru.

Bersama 41 partai lainnya, Partai Keadilan memelopori tuntutan perubahan ketentuan UU Pemilu tentang *electoral threshold* yang tidak adil itu, namun upaya ini buntu karena dihadang oleh sebagian kekuatan partai besar yang khawatir yang akan rivalitas dari kekuatan yang baru tumbuh.

B.3 Fase Baru Perjuangan Partai Keadilan

Partai Keadilan, satu partai yang cukup muda usianya, dipastikan sudah tak dapat lagi mengikuti pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu. Ada satu penghalang besar, yang tak mampu dilampaui, yakni “Virus” *Electoral Threshold* (ET). Namun partainya para aktivis muda ini tak lantas tinggal diam tak turut andil dalam prosesi yang cukup urgen menentukan masa depan bangsa ini. Ada satu wadah baru, yang akan dijadikan lokomotif dalam pemilu mendatang, yakni Partai Keadilan (PK) Sejahtera.

PK Sejahtera yang dipersiapkan sejak 20 April 2002 lalu, telah menjadi partai pertama yang terlengkap untuk diverifikasi di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham). Partai politik dianggap layak menjadi peserta pemilu lolos verifikasi dengan terpenuhinya kepengurusan di 2/3 propinsi; 2/3 Kota/Kabupaten; dan 1.000 anggota per Kota/Kabupaten.

Musyawarah Nasional Istimewa PK (20 April 2003) yang merekomendasikan penggabungan partai keadilan dengan partai Keadilan Sejahtera yang dikokohkan dihadapan notaris.

Dalam menyikapi berbagai situasi yang terus berkembang, maka jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Jateng terus meningkatkan konsolidasinya. Pada rapat pleno DPW tanggal 1 Maret 2002 di Tenganan Kabupaten Semarang, diputuskan beberapa hal penting yang menyangkut keberadaan Partai Keadilan (PK) ke depan, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Terutama terkait dengan pemberlakuan *Electoral Threshold* pada Pemilu mendatang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPW PK Jateng, Muhammad Haris, SS itu dihadiri oleh unsur Badan Pengurus Harian, para Ketua Bidang, serta Ketua Daerah Dakwah tiap-tiap eks karesidenan Se-Jawa Tengah.

Beberapa hal yang keputusan hasil rapat pleno tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Secara resmi DPW PK Jateng memutuskan penggunaan nama partai baru, Partai Keadilan (PK) Sejahtera di seluruh wilayah Jawa Tengah dalam keikutsertaan pada Pemilu 2004 mendatang.
- 2) Di Wilayah Jawa Tengah, PK Sejahtera telah 100 % menyelesaikan syarat administratif untuk mengikuti Pemilu 2004.
- 3) Di tingkat Wilayah telah terbentuk kepengurusan definitif DPW PK Sejahtera Jateng yang telah dikukuhkan oleh SK DPP No. 01/SKEP/DPP-PKS/XII/1423 tertanggal 21 Februari 2003.

Ketua Umum	: Joko Widodo
Sekretaris Umum	: P H Riyadi,S.Pi
Bendahara Umum	: M. Hayati
Ketua Deputy Pembinaan Kader	: Alamsyah S.Kom
Ketua Deputy Organisasi	: Suwardi, S.Ked
Ketua Deputy Kebijakan Publik	: Agung Setia Bakti
Ketua Deputy Kewanitaan	: Aina Hulaya

- 4) Deklarasi PK Sejahtera, di tingkat nasional akan diselenggarakan tanggal 6 April di Jakarta. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, deklarasi akan dilaksanakan pada pertengahan April di Semarang.

- 5) Seluruh jajaran PK di Jawa Tengah akan mulai mensosialisasikan secara masif keberadaan dan jati diri PK Sejahtera sekaligus menegaskan kepada publik, bahwa **PK Sejahtera merupakan penjelmaan dari PK**, baik dalam substansi maupun dalam *performance*-nya.
- 6) Logo resmi PK Sejahtera yang akan dipergunakan dalam pemilu mendatang tak berbeda jauh dengan lambang PK. Hanya saja ada tambahan kata "SEJAHTERA" di bagian bawah lambang bulan sabit kembar. Sedangkan garis lurus yang diapit bulan sabit diganti dengan gambar tangkai padi yang merupakan lambang kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.
- 7) Sekalipun dengan nama partai baru, PK Sejahtera Jateng tetap mencanangkan perolehan suara 8 persen pada Pemilu 2004. Dan tetap optimis dapat mengokohkan diri sebagai 6 partai besar pemenang pemilu di Jateng.
- 8) Menegaskan kepada para kader dan simpatisan PK Sejahtera diminta untuk tetap solid dan menyiapkan diri untuk melaksanakan amanah kepartaian.

B.4 Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah

PK Sejahtera menjadi partai pertama yang diverifikasi di Jawa Tengah. Kepastian ini didapat setelah diterimanya surat dari Depkehham, Selasa (10/6) yang menyebutkan DPW PK Sejahtera Jateng akan diverifikasi tanggal 16 Juni 2004.

Verifikasi akan dilakukan di kantor DPW PK Sejahtera Jateng Jl Erlangga Tengah III No. 35 Semarang oleh tim gabungan Depkehham dan Kesbanglinmas. Kepala Kanwil Depkeh dan HAM Jateng Marsono BcIP SH MH, yang memimpin langsung jalannya verifikasi partai tersebut.

Menurut surat edaran Kanwil Depekehham Jateng bernomor W.9.Um.01.10-104 itu ada tiga hal yang akan diverifikasi. Yakni soal kepengurusan Parpol, kantor tetap dan dokumen penggunaan kantor.

Setelah dilakukan di tingkat wilayah (propinsi), tim akan memverifikasi di daerah-daerah (kabupaten/kota). DPW PK Sejahtera Jateng sendiri telah menyiapkan 23 DPD yang siap untuk diverifikasi. DPD pertama yang akan diverifikasi adalah Kota Semarang pada tanggal 17 Juni 2004. Dilanjutkan secara maraton DPD-DPD lainnya hingga yang terakhir diperiksa DPD

Temanggung pada tanggal 26 Juni. Pada verifikasi di tingkat daerah ini sekaligus diundang pula pengurus parpol tingkat kecamatan (DPC) untuk diproses serupa.

Menghadapi verifikasi ini DPW PK Sejahtera Jateng menyatakan 100 persen sangat siap. Bahkan momen ini sudah sejak lama ditunggu-tunggu. Karena dengan cepat diverifikasi maka keberadaannya secara hukum akan semakin lebih jelas dan tidak mengambang. DPW PK Sejahtera Jateng yakin semua stukturnya dari tingkat propinsi sampai kecamatan akan lolos verifikasi. Keyakinan ini dilatar belakangi oleh kesiapan struktur yang memang sudah rampung menyelesaikan persyaratan yang diminta jauh-jauh hari sebelum UU parpol no 31 tahun 2002 disahkan. Persyaratan pengurus ada di 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan di kabupaten/ kota bersangkutan sudah terlampaui.

Setelah selesai dilakukan, Alhamdulillah dari 33 DPD yang diajukan, semua lolos dan layak disebut partai Politik dan tinggal menunggu surat Keputusan Pengesahan sebagai parpol dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Deklarasi PKS Jateng dilakukan selaras dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di tingkat pusat, maka tepat pada hari Kamis 15 Mei 2003 dideklarasikanlah Partai Keadilan Sejahtera di GOR Tri Lomba Juang Semarang Jawa Tengah yang diikuti oleh seluruh DPD yang ada di Jawa Tengah. Di hadapan 50.000 kader dan simpatisan yang selalu mengumandangkan takbir, Naskah deklarasi dibaca oleh Zuber Safawi, dan dilanjutkan dengan orasi Politik oleh DR. Hidayat Nur Wahid. Tidak lupa pula disemangati tim nasyid Ruhul Jadid Jakarta.

Menjelang verifikasi tahap kedua yaitu verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menentukan apakah Partai keadilan Sejahtera bisa menjadi Partai Politik peserta Pemilu 2004 atau tidak, DPW Jawa Tengah melakukan pergantian kepengurusan yang sesungguhnya, sebagai bentuk penyelarasan dari DPP, yaitu terjadi penggabungan antara Partai Keadilan dan partai Keadilan Sejahtera.

Saat itulah maka kepengurusan kembali sebagaimana kepengurusan Partai Keadilan, yang memang disiapkan untuk *all out* mensukseskan Pemilu 2004. Dan Kepengurusan Partai keadilan Sejahtera masa ini hingga pemilu berakhir terdiri dari :

Ketua Umum	: Muh Haris, SS
Sekretaris Umum	: Sri Praptono S.Sos

Bendahara Umum : Listyo Nugroho, SE
 Ketua Bidang Pembinaan Kader : Mahmud Mahfudz
 Ketua Bidang Organisasi dan Lembaga : Drs. Amin Wahyudi, MM
 Ketua Bidang Kebijakan Publik : Zuber Safawi S.HI
 Ketua Bidang Kewanitaan : Diah rahmawati
 Ketua-ketua Daerah Dakwah : Sudirjo, Kamal Fauzi,
 Agus Abdul latif SE,
 Raden Sukoco, SH. Not,
 Arif Awaludin SH.M.Hum
 Drs.Abdul Firi Faqih, MM.

B.5 PKS Jawa Tengah pada Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, dengan semangat *'aam Intikhobi* dan tentunya atas izin Allah maka Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah mampu menempatkan diri menjadi tujuh besar di Jawa Tengah, dengan perolehan suara **858.283** dari **17.644.333** atau setara dengan 4,86 %. Dari hasil tersebut PKS Jateng berhasil menempatkan tujuh (7) wakilnya di DPRD propinsi Jawa Tengah dan 78 aleg di tingkat Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah.

Tabel 5
Perolehan Suara PEMILU 2004
Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah

DAFIL	PEMILIH	BPP	KUOTA	SUARA	PROSE NTASE	KURSI
1	1871463	187146	10	120408	6.43	1
2	1481860	164651	9	67259	4.54	1
3	2137869	178158	12	57879	2.71	1
4	1563537	195442	8	102985	6.59	1
5	1974473	197447	10	137793	6.98	1
6	2012274	182934	11	89994	4.47	1
7	1530831	160092	9	62975	4.11	0

8	1744971	174497	10	67912	3.89	0
9	1703001	154818	11	95666	5.62	1
10	1624054	162405	10	55412	3.41	0
JUMLAH	17644333		100	858.283	4.86	7

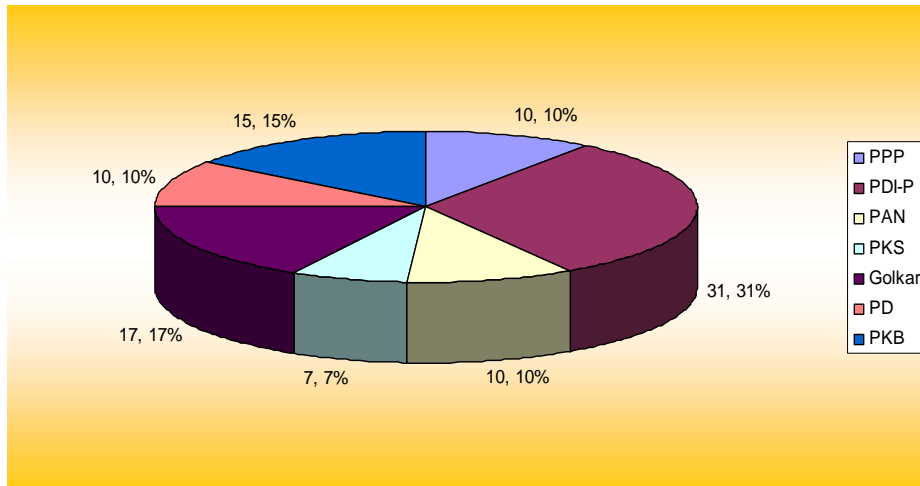
Sumber : BAPILU PKS Jateng

Dari Tabel di atas, dapat kita lihat ada 3 Daerah Pemilihan dimana PKS tidak dapat mengantarkan Calegnya duduk di legislatif, tiga DP tersebut yakni DP 7 (Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, dan Kab. Kebumen), DP 8 (Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas) dan DP 10 (Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan).

B.6 Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah

Pada pemilu 2004 secara keseluruhan di Propinsi Jawa Tengah ada 100 kursi yang diperebutkan oleh 24 partai politik –termasuk di dalamnya Partai Keadilan Sejahtera–. Setelah secara resmi penghitungan suara disahkan, ada 7 partai politik yang berhak mendapatkan kursi di DPRD (Parlemen) ketujuh partai tersebut yakni PPP, PDI-P, PAN, PKS, Golkar, Partai Demokrat, dan PKB.

Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 7 Kursi di DPRD Jawa Tengah yang merupakan jumlah terkecil diantara ketujuh partai yang memperoleh yang berhak mendapatkan kursi. Namun bagi partai yang terbilang baru, prestasi tersebut cukup menggembirakan bagi PKS. Setidaknya dengan duduknya 7 Anggota Legislatif dari PKS tersebut dapat turut serta dan berperan aktif dalam penentuan kebijakan-kebijakan di lingkup pemerintahan Jawa Tengah. Sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jawa Tengah akan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas dan menyeluruh.



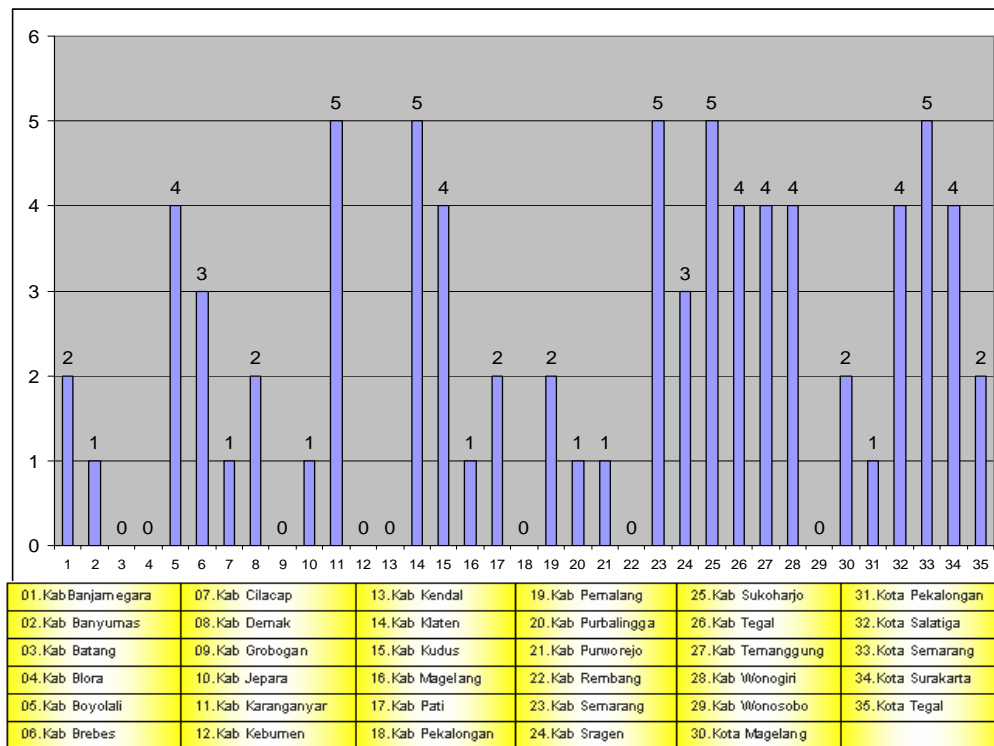
Ketujuh anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut Daerah Pemilihan Jateng 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Jateng 9, yang secara terperinci terdiri dari :

Tabel 7

Daftar Anggota Legislatif PKS Jawa Tengah Hasil Pemilu 2004

Daerah Pemilihan	Nama Anggota Legislatif
Jateng 1	Muh. Haris, SS
Jateng 2	Kamal Fauzi
Jateng 3	Dra. Siti Aisyah
Jateng 4	Agus Abdul Latif, SE
Jateng 5	Mahmud Machfud
Jateng 6	Dra. Nur Cahyo Hidayati Menggantikan Raden Sukoco yang mengundurkan diri pada tahun 2007
Jateng 9	Drs. Abdul Fikri Faqih, MM

Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD tingkat Kota/Kabupaten di seluruh wilayah Jawa Tengah, dari 35 Kota/Kabupaten tercatat ada 8 Kabupaten dimana PKS tidak berhasil mengantarkan wakilnya duduk di lembaga legislatif. Kedelapan Kabupaten tersebut adalah :



D.7 PK Kabupaten Semarang

Sejalan dengan dimana ditingkat Nasional maupun Jawa Tengah PKS Kabupaten Semarang pun mengalami dinamika baik pergantian nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, perubahan struktur maupun kiprah kelembagaan maupun kader yang menjadi anggota legislatif.

PK Kabupaten Semarang dilantik dan diresmikan pada tanggal 20 September 1998, sebagai ketua ditunjuk Yusuf Khoirudin, AMD sebagai Ketua, Ahmad Hani, SPd sebagai Sekretaris dan Joko Purwanto, SH sebagai bendahara Partai.

Dinamika PK Kabupaten Semarang menjelang pemilu 1999 selaras dengan kebijakan partai secara nasional. Proses pengenalan partai dilakukan melalui *Direct Selling* pengenalan partai dari rumah ke rumah, bhakti sosial maupun Training Orientasi Pengenalan (TOP) Partai bagi para tokoh masyarakat.

Dengan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat terutama tokoh agama pada pemilu tahun 1999 PK kabupaten Semarang memperoleh suara sebesar 4.034 sehingga

memperoleh jatah satu kursi di DPRD. Salah satu keunggulan PK yang saat ini juga menjadi keunggulan PKS adalah adanya mekanisme syuro yang menjadi kunci penetapan kebijakan partai. Sehingga ditetapkanlah Ahmad Munib sebagai anggota legislatif dari PK pada tahun 1999-2004.

B.8 PKS Kabupaten Semarang

Seiring dengan kebijakan pembentukan wadah baru bernama Partai Keadilan Sejahtera maka di Kabupaten Semarang disusun kepengurusan baru dengan Ahmad Rohim, SH sebagai ketua, Nurhadi Susilo, SPd sebagai sekretaris dan Muhammad Nurrofiq Sag sebagai bendahara. Menjelang pemilu 2004 keterlibatan tokoh masyarakat yang didorong oleh semangat membesarkan partai dakwah ini begitu besar. Kegiatan partai dan tertumbuhan struktur partai berjalan dengan cepat. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh masyarakat yang bergabung dalam kepengurusan maupun kerja-kerja partai.

Pada pemilu 2004 tersebut PKS Kabupaten Semarang memperoleh jumlah suara sebesar 30.370 dan berhasil mendudukkan 5 anggota legislatif di DPRD Kabupaten Semarang. Mereka adalah Dahlan Murdani, Amd yang berasal dari DP I, Dra Husni Anisah dari DP II, dr. H. Anis Supriyadi dari DP III, Nur Fathan, SH dari DP IV dan Agus Warsito dari DP V.

B.9 PKS DESA JETAK

Desa Getasan adalah salah satu desa yang sejak berdirinya PK di Kabupaten Semarang sudah memiliki struktur yang lengkap. Pada saat PK dipimpin oleh Suwandi, ST. Setelah pemilu 1999 terjadi perombakan pada saat itu Ketua dipimpin oleh Muniroh, SPd, Wakil Ketua Agus warsito, Sekretaris Eli Suherli, Amd sedangkan Bendahara adalah Marhamah, Sag.

Selain karena adanya struktur kelebihan PKS Desa Jetak adalah banyaknya keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh PKS. Muniroh adalah Kepala sekolah SDIT Izatul Islam, Agus Warsito Direktur Koperasi Andini Luhur, dan Marhamah, Sag Kepala TKIT Nurul Islam.

C. Keadaan Geografi Desa Jetak Kecamatan Getaan Kabupaten Semarang

Desa Jetak Kecamatan Getasan terletak di bagian selatan Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Salatiga, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Randuacir Kota Salatiga.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Patemon Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Sebelah Barat : berbatasan Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

Desa ini berada pada ketinggian 700 meter diatas muka air laut, dengan beriklim sejuk. Luas desa mencapai 547,5 ha dengan perincian didominasi oleh tanah tegalan sebesar 114 ha, sedangkan lahan pekarangan mencapai 82,5 ha, untuk lahan pertanian sebesar 294 ha, sisanya sebesar 57 ha tanah dengan fungsi sebagai lapangan olah raga, kuburan serta lain- lain.

Secara obituri, jarak antara desa Jetak dengan ibukota kecamatan Getasan mencapai 8 Km dengan jarak tempuh 15 menit. Sedangkan jarak dengan ibu kota Kabupaten Semarang mencapai 40 Km dengan jarak tempuh 1 jam. Faktor jarak yang jauh dari ibu kota Kabupaten menyebabkan masyarakat tidak banyak berkembang serta daerah yang cenderung berisi pesawahan dan tegalan menyebabkan daerah ini sebagai daerah yang dikategorikan desa.

D. Keadaan Demografi Desa Jetak Kecamatan Getasan

Dilihat dari aspek Kepemerintahan Desa Jetak terdiri dari 12 dusun yang terbagi menjadi 13 Rukun Warga (RW), serta 33 Rukun Tetangga (RT).

Desa Jetak dihuni oleh 1.048 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3723 orang. Dengan komposisi 1793 laki-laki dan 1930 perempuan. Dilihat dari agama, penduduk yang beragama Islam sebanyak 3274 orang, Katolik sebesar 11 orang, Kristen Protestan sebanyak 333 orang, Budha sebanyak 106 orang, sedangkan Hindu : 0 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 1000 orang, sedangkan yang tamat SD sebanyak 949 orang, tamat SLTP sebanyak 365 orang, tamat SLTA sebanyak 394 orang, sedangkan sebanyak lulus perguruan tinggi 41 orang.

Dilihat dari pekerjaan, penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1299 orang, pengusaha industri kecil sebanyak 50 orang, buruh tani sebanyak 89 orang, buruh industri sebanyak 100 orang, buruh bangunan sebanyak 275 orang, pedagang sebanyak 148 orang, jasa pengangkutan sebanyak 25 orang, TNI sebanyak 5 orang, PNS sebanyak 26 orang, pensiunan sebanyak 11 orang, peternak sapi sebanyak 24 orang, peternak ayam sebanyak 2 orang, pegawai swasta sebanyak 45 orang, TKI sebanyak 29 orang, dan lain-lain sebanyak 23 orang. (Sumber Monografi Kependudukan Desa Jetak tahun 2005).

Dilihat dari usia penduduk sebagai acuan untuk ikut memilih pada tahun 2004 yang lalu, penduduk dengan usia 19-24 sebanyak 493 orang, 25-56 tahun 1452 orang, 56-65 tahun 366 orang, 66 tahun keatas sebanyak 321 orang.

Dengan asumsi tidak ada meninggal maka jumlah pemilih pada tahun 2004 yang lalu mencapai 2632 orang. Dilihat kondisi ekonomi masyarakat secara umum mereka berada di dalam kelompok menengah kebawah. Sebagian diantara mereka menghuni rumah sendiri meskipun

dengan kondisi sangat sederhana. Untuk keperluan makan mereka memanfaatkan tanah yang dimiliki untuk bercocok tanam beberapa kebutuhan sayur-mayur, akses informasi dan hiburan diperoleh dari mendengarkan radio dan melihat televisi yang hampir dimiliki oleh semua keluarga.

BAB IV

KEMENANGAN PKS DI DESA JETAK

A. ALASAN MASYARAKAT DESA MEMILIH PARTAI

Untuk melihat secara detail apa yang menjadi alasan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan dalam pemilihan umum perlu kita mengetahui persepsi masyarakat tentang makna pemilihan umum bagi masyarakat Desa Jetak.

Menurut Martodikromo (55 tahun), pemilu dipersepsikan sebagai pesta bagi masyarakat kecil yang berarti saat masyarakat mendapatkan hiburan gratis dengan panggung hiburan dimana-mana bahkan ada kesempatan untuk bertemu dengan artis ibukota yang selama ini hanya dapat dilihat dari televisi. Selain itu Pemilu dimaknai sebagai sarana untuk mendapatkan kaos gratis dari partai-partai.

Namun Demikian menurut Martodikromo, mempunyai pendapat bahwa partai yang dipilih adalah partai yang baik. partai yang baik adalah partai yang mampu memperhatikan kebutuhan “*wong cilik*”, diantaranya buruh, pedagang dan petani. Perhatian terhadap “*wong cilik*” diartikan keberpihakan secara ekonomi dengan pekerjaan mudah dan harga-harga murah untuk kebutuhan pokok mereka.

Selain itu sebuah partai dipilih, selain karena partai juga dilihat dari figur calon legislatif. Figur yang dipilih adalah figur yang mereka kenal yang tidak ada catatan buruk baik perilaku maupun mental (*track record*) bagus. Disamping itu keberadaan kader partai yang baik dilingkungan mereka akan menjadi faktor yang efektif untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

Sedangkan menurut Sigit Purnomo (35 tahun), mempunyai persepsi tentang pemilu merupakan ajang pesta demokrasi bagi masyarakat. Ia mempersepsikan pemilu adalah sarana untuk memujudkan serta memperjuangkan segala harapan rakyat, pemilu bukan sekedar pesta hura-hura tanpa makna. Namun didalamnya sarat dengan pesan-pesan yang baik untuk kita simak. Pertama, dalam pemilu ada pesan ‘pertandingan’. Kedua, ada pesan ‘*fair play*’, artinya bertandingleh secara fair. Kampanyelah secara fair, tidak melakukan ‘black campaign’ terhadap lawan politik, bahkan janganlah melakukan politik uang. Pertandingan antar kandidat, antar partai, namun harus *gentle*. Artinya yang kalah harus mengakui kekalahannya, dan tidak mencari-cari kesalahan yang menang, demikian pula yang menang jangan sampai mabuk kemenangan.

Partai yang baik menurut Pak Sigit adalah partai yang konsisten dengan program kerjanya. Di tingkat kabupaten, maka tuntutan warga akan semakin riil, seperti janji reformasi tanah, peningkatan kesejahteraan buruh, dan kesejahteraan petani. Permasalahan-permasalahan yang ‘dekat’ dengan wong cilik inilah yang akan selalu dimonitor dan dievaluasi warga. Kalau sinkron, berarti partai itu akan mendapat nilai dan respon positif dari warga. Selain itu, anggota legislatif yang mewakili partai untuk tidak segan-segan berdialog dengan masyarakat baik dalam forum formal maupun informal untuk membahas segala persoalan di tingkat ‘grass root’. Ini penting, tidak saja untuk memenuhi kepentingan warga, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran bagi anggota legislatif, untuk terus pasang telinga, mendengar detak jantung warga, dan melihat kenyataan dan ‘kasunyatan’ warga, sehingga dapat menjadi bahan masukan ketika harus berhadapan dengan eksekutif.

Dalam memilih partai, Pak Sigit mempertimbangkan ideologi partai. Ideologi kebangsaan menjadi daya tariknya. Alasannya, pluralisme telah menjadi sebuah fakta dan

‘kasunyatan’ yang ada sejak Indonesia ini bahkan sebelum merdeka 17 Agustus 1945. Keberagaman itu tidak saja soal agama, suku, bahasa tetapi juga cara pandang, filsafat hidup dan perilaku. Oleh karenanya, partai yang mampu menjamin eksistensi pluralisme akan dia dukung,

Menurut Suminem (45 tahun) seorang pedagang pasar, pemilu dipersepsikan sebagai ‘gawe besar’ pemerintah. Di sana ada pesta, pemasangan umbul-umbul, bendera, dangdutan dan bagi-bagi kaos.

Partai yang baik menurut Bu Nem adalah partai yang peduli pada kehidupan wong cilik, khususnya petani, karena kehidupan dia ada di pedesaan. Pemberdayaan petani melalui berbagai program yang terstruktur (dan bukan dadakan menjelang pemilu saja) yang diperkirakan akan mendapat simpati warga.

Alasan Bu Nem dalam memilih partai hanya ikut-ikutan tetangga saja. Bu Nem lebih melihat siapa yang mengajak untuk memilih partai lebih diutamakan. “*manut kalian engkang langkung paham*” (ngikut yang lebih mengerti) katanya setiap diulang pertanyaan alasan memilih partai.

Lain lagi pendapat Wahyu Saputro (22 tahun) karena seorang mahasiswa pemilu menurutnya merupakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia, dimana seluruh rakyat berkesempatan memilih wakil-wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hati nuraninya.

Partai yang baik menurut Wahyu adalah partai yang mengayomi rakyat dan merealisasikan janji-janji yang disampaikan jurkam ketika kampanye, tidak hanya isapan jempol belaka. Mengayomi rakyat menurutnya adalah tidak hanya ketika kampanye dengan memberikan sejumlah uang, kaos, sembako agar dikira peduli pada rakyat. Namun lebih dari itu, partai harus bisa membawa aspirasi dan tahu kondisi rakyatnya dengan cara seringnya wakil-wakil rakyat

melakukan ‘turba’, karena partai merupakan satu-satunya wadah untuk menampung aspirasi dari rakyat dan karena itulah rakyat memilih partai tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan dalam memilih partai menurut Wahyu adalah calon-calon wakil rakyat harus bersih KKN, presiden maupun wakilnya harus bersih KKN, sehat, serta punya hubungan luar negeri. Menurut Wahyu fungsi partai politik adalah *tunggangannya* rakyat, sehingga partai harus tahu kemauan rakyat.

Sedangkan menurut Sukirno (38 tahun) seorang tamatan Sekolah Dasar, yang saat ini menjadi buruh lepas, pemilu merupakan gawe pemerintah untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Saat pemilu menurutnya adalah saat pembagian sembako (sembilan bahan pokok) secara gratis dari berbagai partai yang masuk kedesaanya. Selain itu, kata Pak Kirno, didesanya sering diadakan pentas seni dangdutan yang mendatangkan artis-artis lokal maupun dari ibu kota. yang menjadi hiburan dadakan bagi masyarakat pedesaan.

Ketika ditanya mengenai partai politik yang baik, ia menjawab sederhana saja, yaitu dapat menyejahterakan rakyat, tidak susah mencari pekerjaan dan harga-harga sembako bisa turun. Dia beranggapan partai politik hanya berfungsi, memilih presiden dan wakil presiden.

Ketika ditanya alasan memilih partai, Kirno menjawab asalkan partai “berbau” Islam maka ia akan memilihnya.

Pendapat lain diberikan oleh Sutrisno (40 th) lulusan SMA yang bekerja berwiraswasta menjual berbagai bahan kebutuhan untuk pertanian.

Pemilu menurut pak Trisno (panggilan akrab beliau) adalah pesta demokrasi lima tahunan sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat.

Partai yang baik menurut pak Trisno adalah partai yang bisa mewakili aspirasi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan.

B. Deskripsi Hasil Wawancara Responden Pendukung Partai Keadilan Sejahtera

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Muhsoni (47 Thn), beliau ini berdomisili di Dusun Miri, yang masih wilayah Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bapak muhsoni ini merupakan warga yang bekerja sebagai petani biasa, dalam dunia politik bapak ini belum mengenal banyak keunggulan dan kelebihan masing-masing partai politik yang ada pada masa sekarang ini. Pada zaman orde baru bapak muhsoni hanya mengenal 3 partai politik yang ada pada zaman tersebut. Pada pemilu 1999, partai keadilan sejahtera menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 partai yang mengikuti pemilu 1999, bahkan di Jakarta partai keadilan sejahtera menempati peringkat kelima. Pada tahun 1999 bapak muhsoni telah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera, hal ini beliau ungkapkan karena telah mengetahui apa yang menjadi asas dan tujuan dari Partai Keadilan Sejahtera. bapak muhsoni menyatakan bahwa asas dari Partai Keadilan Sejahtera adalah asas islam, hal ini sesuai dengan keyakinan yang telah dianut oleh bapak muhsoni, selain itu partai keadilan sejahtera yang merupakan partai dakwah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi oleh *Allah Subhanahu Wata`ala*, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila. Bagi bapak muhsoni PKS merupakan wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat, sehingga harapan bapak muhsoni adalah apa yang menjadi keinginan orang banyak atau rakyat dapat tersalurkan sehingga dapat dipertahankan apa yang menjadi keinginan rakyat.
2. Bapak Surodi (51 Tahun), bapak ini merupakan kepala Dusun Legok, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. sebelum menjadi anggota Partai Keadilan

Sejahtera bapak surodi ini sudah menjadi anggota partai berlambang beringin yaitu golongan karya (GOLKAR). Hal ini menurut pengalaman yang diceritakan oleh bapak surodi, pada zaman orde baru hanya ada tiga partai yang ada yaitu PPP, Golkar dan PDI, partai yang besar pada saat itu adalah golkar yang setiap kali pemilu menjadi nomor satu dalam perolehan suara. adanya anjuran untuk memilih dan menjadi anggota partai golkar pada saat itu kepada pegawai pemerintahan bahkan sampai dengan perangkat desa, hal ini juga yang mendasari bapak surodi untuk ikut menjadi partisipan partai golkar. namun setelah adanya reformasi pada tahun 1998, banyak partai yang menjadi pilihan sehingga pada pemilu tahun 1999 tercatat 48 partai politik yang resmi. sebagai orang awam terhadap dunia politik yang ada bapak telah mencari beberapa partai politik yang sesuai dengan keyakinan mencari informasi yang ada dari berbagai media yang ada. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang mengambil sumber ideologi islam, hal ini yang membedakan partai keadilan dengan partai yang lain secara tegas juga bahwa bapak Hidayat Nurwahid yang menjabat sebagai presiden PKS mengutarakan bahwa yang membedakan dengan partai islam lain dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai pijakan politik. sejak tahun 1999 sampai sekarang terus aktif dan berpartisipasi dalam mengembangkan amanat dan tujuan dari PKS demi terwujudnya tujuan bersama.

3. Hadi Siswanti (61 Tahun), bapak ini penduduk asli Dusun Jayan, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bapak hadi dalam pernyataan menyatakan bahwa persepsi tentang atau pemahaman politik tentang partai akan berbeda satu dengan yang lain. orde baru dapat kita lihat bahwa pada saat itu pengkaderan yang dilakukan oleh PDI dan PPP mengalami kesulitan dan hambatan, sementara berbeda dengan partai golkar yang begitu mudah dengan mencari kader-kader sampai tingkat pedesaan. kader-kader

yang terpilih adalah orang-orang terpelajar sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik bagi partai. Setelah orde baru maka terjadi berbagai perubahan dalam dunia politik yang ada di Indonesia hingga mencapai 48 partai pada pemilu 1999. Dengan banyaknya partai yang ada akan memberikan banyak pilihan terhadap rakyat kecil, pengkaderan yang dilakukan oleh PKS melibatkan anak-anak yang terdidik akan membawa dampak yang baik untuk kemajuan PKS. Hal ini pula yang dialami oleh Bapak Hadi bahwa anaknya telah menjadi kader PKS. Sehingga informasi yang tepat dan akurat tentang PKS mengakibatkan Pak Hadi seolah mengerti benar tentang PKS, sebagai partai yang memihak kepada rakyat. Penyampaian informasi yang tepat tentang apa yang menjadi tujuan dari partai akan memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan tanda tanya karena pada masa sekarang ini rakyat telah diberikan janji-janji yang sampai saat ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

4. Suyitno (62 Tahun), Bapak Suyitno bekerja sebagai kepala urusan pemerintahan di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Sebagai kepala urusan pemerintahan di Desa Jetak, bapak ini merupakan kader partai golkar pada zaman orde baru. Namun seiring Bapak suyitno kemudian menjadi bagian dari PKS pada tahun 1999. Pilihan pada PKS disebabkan tujuan dari partai yang ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi oleh *Allah Subhanahu Wata`ala*, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila. Hal ini yang mendasari bergabungnya bapak suyitno menjadi bagian dari partai keadilan sejahtera, selain itu juga adanya tindakan-tindakan konkret yang banyak dilakukan oleh militan-militan dari kader PKS untuk membantu sesama baik dalam bencana alam atau yang lain yang bersifat sosial.

5. Amin Ahmadi (70 Tahun) Tokoh Agama Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. bapak Amin ini merupakan tokoh agama islam yang merupakan panutan bagi masyarakat sekitar, sebagai tokoh agama di masyarakat bapak amin memilih untuk netral dalam menentukan pilihan terutama untuk partai, walaupun pada masa orde baru telah ada partai yang mengajak untuk menjadi partisipan, namun Bapak Amin lebih memilih untuk netral. Hal ini dilakukan karena menurutnya belum ada partai yang sesuai dengan yang apa diyakini baik asas, tujuan maupun visi dari partai yang ada. Pemilu pada tahun 1999 telah memberikan gambaran serta wacana baru, hal ini dikarenakan telah banyaknya partai yang ada dengan berbagai asas, tujuan dan misi yang berbeda. Bapak Amin menjatuhkan pilihan pada PKS, hal ini didasarkan pada PKS merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia yang memiliki ideologi yang jelas, hal ini karena PKS sebagai gerakan tarbiyah yang merupakan tulang punggung dan pendukung utama partai ini mencoba untuk menformulasikan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Amin PKS merupakan salah satu bagian dari keyakinan mereka bahwa partai merupakan alat dalam mengemban misi islam yang universal.
6. Sarju (40 Tahun), yang merupakan tokoh pemuda dusun Legok Desa Jetak Kecamatan Getasan. Sebelum menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bapak Sarju menjadi partisan PDIP. Menurutnya PDI Perjuangan merupakan partai yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama kedudukan, sosial dan gender serta berwatak kebangsaan indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial yang perjuangan dilandaskan pancasila. Seiring dengan perjalanan waktu sarju menjadi bagian dari PDIP, bapak sarju menilai bahwa dalam kenyataan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau keyakinannya. Banyak pertimbangan dan alasan kemudian dicari untuk

menjadi bagian partai tertentu dari mulai azas, tujuan, program kerja dan lain-lain. PKS menjadi pilihan dari bapak sarju, hal ini didasarkan bahwa PKS lebih menfokuskan dengan hal-hal yang terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat, sandang, pangan, papan dan diimbangi dengan penegakan hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan prinsip persamaan warga didepan hukum.

7. Sukir (54 Tahun), bapak ini merupakan tokoh masyarakat di Dusun Tosoro Desa Jetak Kecamatan Getasan. Sebagai tokoh masyarakat tentu saja mempunyai pengaruh dalam masyarakat tentu saja menjadi target dari partai-partai. Pada tahun 1999 Bapak Sukir memilih PKS yang telah membuktikan dalam kenyataan yang lebih menfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Wujud nyata yang dilihat dari aktifitas baik secara kelembagaan maupun secara personal para pihak yang merupakan kader PKS di desa Jetak. Harapanya dengan bergabung dengan PKS niat untuk membantu masyarakat akan semakin terbuka.
8. Yusmin (50 Tahun), Bapak yusmin merupakan tokoh agama budha di Desa Jetak Kecamatan Getasan. Dalam hal Bapak Yusmin memiliki prinsip dan keyakinan sendiri dalam memilih suatu partai, keterbukaan untuk semua tanpa membedakan keturunan, agama dan ras jadi semua sama warga negara indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman Bapak Yusmin menjadi bagian dari PDIP merasakan bahwa adanya pertentangan dalam diri dan hati nurani tentu saja berkaitan dengan kenyataan tentang pelaksanaan azas, tujuan dan pencapaian tujuan yang menurutnya tidak sesuai. Kemudian bapak yusmin mendengar dan memahami PKS yang merupakan partai islam yang komit terhadap azas dan tujuan dari partai, namun dalam pikiran karena adanya perbedaan keyakinan dari bapak yusmin belum berani untuk ikut menjadi bagian dari PKS,

kemudian bapak yusmin melakukan pendekatan kepada pimpinan PKS tentang orang yang berbeda keyakinan dapat menjadi bagian dari PKS, tanggapan positif diberikan oleh PKS yang membuka diri untuk siapapun baik yang berbeda keyakinan dapat diterima sebagai bagian dari PKS, hal ini disebabkan ada kesamaan kepentingan bangsa dan negara. Dengan jaminan tersebut Bapak Yusmin mantap menjadi bagian PKS Jetak.

9. Slamet (55 Tahun), bapak ini merupakan tokoh agama kristen katolik Desa Jetak Kecamatan Getasan. Sebagai tokoh agama kristen katolik di masyarakat bapak slamet menjadi bagian dari partai berlambang pohon beringin. Hal ini disebabkan pada waktu itu partai golongan karya telah memberikan kontribusi pada pada kemajuan bangsa dan negara. Setelah berakhirnya orde baru kemudian telah muncul banyak partai yang berlomba sebanyak 48 partai yang ikut pada pemilu pada tahun 1999, konsistensi dan komitmen tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh bapak slamet. Hal ini yang menyebabkan bapak sukir memilih PKS yang telah membuktikan dalam kenyataan yang lebih menfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. walaupun berbeda keyakinan namun bapak slamet mendapat tanggapan positif dari PKS.

10. Sularto (49 Tahun), Bapak sularto merupakan tokoh agama kristen protestan di Desa Jetak Kecamatan Getasan. sebagai tokoh agama kristen protestan bapak yusmin memiliki prinsip dan keyakinan sendiri dalam memilih suatu partai, sebelumnya Bapak Sularto menjadi bagian dari PDIP. Namun ia merasakan bahwa adanya pertentangan dalam diri dan hati nurani tentu saja berkaitan dengan kenyataan tentang pelaksanaan azas, tujuan dan pencapaian tujuan. Banyak pertimbangan dan alasan kemudian dicari untuk menjadi bagian partai tertentu dari mulai azas, tujuan, program kerja dan lain-lain. PKS menjadi pilihannya, didasarkan bahwa PKS telah membuktikan bahwa PKS lebih menfokuskan

pada masalah kesejahteraan masyarakat, sandang, pangan, papan dan diimbangi dengan penegakan hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan prinsip persamaan warga didepan hukum.

C. Pembahasan

Jika disandarkan pada perilaku pemilih, tiga model yang diungkapkan oleh Lingkaran Survey Indonesia yang menjadi model perilaku pemilih di Indonesia, yakni model sosiologi, model psikologis dan model ekonomi politik, ketiganya terdapat di Desa Jetak.

Kelompok masyarakat yang menggunakan model sosiologi dengan asumsi bahwa pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis terutama kelas sosial, agama dan kelompok etnis. Di Desa Jetak model ini terlihat cukup dominan karena masuknya unsur agama. Ada tiga kelompok besar penganut agama yang menjadi rujukan masyarakat. Di kalangan umat islam ketokohan Bapak Ahmadi dan Agus warsito cukup dominan mempengaruhi pilihan masyarakat muslim. Untuk pemilih agama Budha keberadaan Yusmin akan menjadi rujukan, demikian pulan Slamet slaku tokoh agama kriste katolik, dan sular to sebagai tokoh agama kristen protestan.

Pendekatan Model Psikologis yang dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan faktor-faktor psikologis yakni kedekatan, perasaan, keterlibatan dan sikap seorang terhadap tokoh partai. Model ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ekonomi. Sehingga untuk Desa Jetak sebagian besar masyarakat menyandarkan pilihannya pada orang lain yang dianggap lebih pintar dan dipercaya. Hal itu tercermin dari ungkapan ibu Suminem *"manut kalian engang langkung paham"* mewakili masyarakat dengan kelas sosial dan pendidikan yang sama.

Pendekatan ketiga adalah Model ekonomi politik yang menekankan pada penilaian rasional pemilih terutama dalam menangani dan mengatasi masalah ekonomi. Dalam jangka panjang masyarakat akan melihat program kerja partai, namun dalam jangka pendek akan melihat ada

tidaknya ”*sangu*” politik. Di desa Jetak hal itu bisa diwakili pendapat Sukirno bahwa pemilu adalah momentum pembagian sembako, bagi-bagi uang serta hiburan artis ibu kota.

C.Mengapa Masyarakat Jetak Memilih PKS ?

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap para responden dapat diambil kesimpulan bahwa kemenangan PKS di Desa Jetak disebabkan oleh dominannya kecenderungan masyarakat yang memilih menggunakan pendekatan Sosiologis dan Psikologis.

Keberadaan Sukir sebagai kaur kesra, Yusmin sebagai tokoh agama Budha, Samet yang tokoh agama Kristen katolik, Sutarto yang merupakan tokoh agama kristen protes, Ahmadi tokoh agama islam, Agus Warsito yang merupakan ketua koperasi susu Andini, serta keberadaan Marhamah yang juga kepala Sekolah TKIT Nurul Islam yang mendukung PKS menjadi faktor penyebab kemenangan PKS.

Hampir semua tokoh masyarakat dari berbagai golongan mampu disatukan dalam naungan PKS desa Jetak. Selanjutnya pertanyaan yang mendasar adalah mengapa para tokoh masyarakat tersebut bergabung dengan PKS. Ada beberapa hal yang menjadi alasan utama :

C.1 Fenomena Demonstrasi Paling Santun

Masyarakat Desa Jetak melihat dari media elektronik betapa santunnya kader PKS dalam menyampaikan demonstrasi. Ciri khas unjuk rasa atau demonstrasi yang digelar kader PKS adalah, proses demonstrasi yang berlangsung damai, santun, namun tetap kritis terhadap objek yang diprotes. Hal ini yang menjadikan bahan diskusi oleh sebagian besar responden ketika ditanya apa yang diingat dari PKS.

Aksi yang disebut oleh Gubernur DKI Sutiyoso sebagai aksi demo PKS layak dijadikan percontohan objek wisata politik di Ibu Kota (kompas, 23 maret 2002).

Ambil contoh unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlangsung pada 18 Januari 2002. Lebih dari 1.000 pengunjung rasa turun ke jalan. Mereka mengadakan aksi secara terpisah di sekitar gedung DPR, dan di beberapa kampus. Kantor Menko Kesra pun diwarnai aksi para ibu berjilbab putih. berbaris rapi bak hendak antre membeli BBM, sebagian pengunjung rasa membawa jerigen-jerigen kecil. Mereka bergerak tanpa pengawalan aparat keamanan.

Klimaks dari prestasi unjuk rasa massa PKS adalah ketika parpol tersebut ditunjuk sebagai koordinator unjuk rasa satu juta massa dari berbagai kelompok massa. Sekitar satu juta orang yang berasal dari sekurangnya 25 partai politik dan organisasi kemasyarakatan hari minggu, 30 Maret 2003, melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, dalam rangka menentang invasi AS ke Irak. Massa yang menyebut diri sebagai komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak dan menyebut aksinya didukung tiga juta orang ini mengutuk serangan yang dianggap sebagai sumber perusak tatanan dunia.

Fenomena yang baru menurut masyarakat, berkumpulnya banyak orang untuk menyampaikan kritik namun tidak menimbulkan kekrisuhan, ditengah trauma masyarakat akan peristiwa Mei 1998. Pemberitaan yang positif tentang fenomena kesantunan ini mampu membawa PKS pada tingkat pengenalan yang cukup tinggi di masyarakat.

D.2 Keberpihakan Pada *Wong Cilik*

Langkah PKS untuk menyampa secara rutin dan terus menerus kepada masyarakat kecil membuat sebagian masyarakat menjatuhkan pilihanya kepada PKS. Banyak masyarakat Desa Jetak yang mengakui kehadiran PKS sering membantu permasalahan mereka. Bakti Sosial yang menghadirkan pengobatan murah atau bahkan gratis, bazar sembako, serta

bantuan pengajaran anak-anak mereka baik pelajaran sekolah maupun ngaji menyebabkan masyarakat akrab dengan PKS bukan hanya saat menjelang pemilu saja.

Kehadiran PKS dalam aktifitas sosial seolah menjadi air penyejuk bagi kehausan masyarakat akan langkah konkrit partai politik. Setuhan kecil yang jarang bahkan tidak pernah diberikan oleh partai politik kecuali menjelang pemilu.

Perhatian terhadap Wong Cilik ini merupakan penjabaran dari konsep dasar yang tertuang dalam platform PKS. Dalam Platform bidang ekonomi terlihat dua diantaranya menjadi landasan akan performa PKS dalam pembelaan terhadap wong cilik yaitu pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan (MPP PKS, 2007). Dua hal inilah yang memberikan inspirasi kedekatan PKS dengan masyarakat.

PKS yang bercita-cita membangkitkan kembali perekonomian bangsa melalui pembangkitan ekonomi wong cilik. Karena ekonomi wong cilik merupakan fondasi perekonomian bagi rakyat kebanyakan, itu sebabnya menyejahterakan ekonomi wong cilik sama artinya menyejahterakan mayoritas bangsa ini. Bagi PKS krisis ekonomi nasional memerlukan penyelesaian tuntas, karena itu harus ada agenda yang konkrit. Karena itu perlu segera dibangun unit-unit usaha mandiri, pembelaan terhadap buruh, nelayan, petani, dan pedagang kecil. Termasuk diantaranya perlu membentuk balai-balai latihan kerja, penumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah dan pendayagunaan sumber daya alam yang menganggur. Karena itu PKS mengembangkan perhatian dan perjuangannya pada empat kelompok masyarakat yakni petani, buruh, nelayan dan usaha kecil dan menengah (UKM). Setuhan sederhana PKS dalam masalah-masalah yang menyangkut masyarakat kecil sangat membekas dimata masyarakat.

D.3 Partai Yang Bersih Dan Peduli

Tampilnya PKS dengan jargon bersih dan lebih peduli dalam iklim KKN serta mental individualisme yang merajalela seperti sekarang ini menjadi pertimbangan masyarakat Jetak untuk memilih PKS.

Jargon itu mampu menjadi gaung besar dengan dukungan semua kader yang menjadi pejabat publik. Tampilnya tujuh anggota dewan DPR RI memberikan warna baru dalam benak masyarakat. Pemberitaan tentang Zuber Syafawi yang disebut oleh harian Suara Merdeka sebagai monumen kejujuran Jawa Tengah menguatkan Jargon ini di masyarakat.

Fenomena citra PKS inilah yang menjadi perbincangan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa Jetak ini, seolah menjadi sesuatu yang aneh menurut warga. System imunitas PKS dalam menjaga kebersihan dari berbagai jenis perangkat KKN dan melampiaskan kepeduliannya pada berbagai penderitaan rakyat kecil, dirasakan sebagai parpol yang sama sekali unik. PKS lebih dirasakan sebagai institusi dakwah ketimbang institusi parpol.

Untuk membuktikan dan menjamin kebersihannya, caleg PKS adalah satu-satunya caleg parpol yang berani meneken kontrak sosial dengan rakyat pemilih. Bahkan sejumlah kader PKS telah melakukan kontrak sosial tidak hanya dengan massa pemilih tapi juga dengan mahasiswa. Suatu sikap yang tidak pernah dan tidak akan sanggup dilakukan caleg dari parpol lain. Isi kontrak sosial ini memuat tiga komitmen yang harus dipenuhi seorang caleg PKS, yaitu komitmen keagamaan, kepartaian, dan komitmen keuangan.

Sebuah konsep pencitraan yang dipadu dengan ketaatan kader yang menjabat sebagai pejabat public, mampu meraih simpati kalangan terpelajar dan tokoh masyarakat.

D.4 Peranan Tokoh Lokal.

Ditengah budaya masyarakat yang cenderung masih feodal, peranan tokoh lokal dalam mendorong pemilih terutama kalangan berpendidikan rendah dan masyarakat yang kurang perhatian terhadap masalah politik menjadi sangat penting. Desa Jetak yang mayoritas masyarakatnya kurang memahami masalah politik perlu mendapatkan sentuhan informasi maupun arahan dari orang yang dipercaya masyarakat. Kemenangan PKS sangat dipengaruhi oleh keberadaan calon anggota legislatife untuk DPRD Kabupaten Semarang yang merupakan warga asli daerah tersebut. Agus Warsito yang dikenal sebagai orang baik di daerah tersebut yang menjadi caleg mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. Kecenderungan masyarakat akan memilih orang yang dikenal dari pada orang yang tidak dikenal.

Selain itu keberadaan tokoh masyarakat misalnya kepala dusun, tokoh agama terbukti efektif dalam membantu mendulang suara. Keberadaan Suyitno sebagai tokoh masyarakat, Sarju sebagai tokoh pemuda, serta Sularto, Slamet, Yusmin, Sukir dan Amin Ahmadi sebagai tokoh lintas agama mampu sebagai magnet sendiri bagi masyarakat.

Selain secara ketokohan mereka diakui oleh masyarakat, dukungan mereka memberikan bukti bahwa PKS merupakan partai yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara Indonesia. Hal ini sekaligus akan menjawab keinginan masyarakat untuk tetap menjaga NKRI.

D.5 Peranan Struktur Partai

Kunci kemenangan PKS di Desa Jetak tidak luput dari peranan struktur terkecil sebagai ujung tombak partai. Keberadaan struktur sampai tingkat ranting akan membantu komunikasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan partai maupun pemerintah. Keberadaan struktur DPRa sebagai wadah aspirasi masyarakat kecil, jendela partai, penyambung lidah.

Apalagi melihat respon masyarakat usai membaca berita, mereka akan serta merta menghubungkan dengan fenomena yang berada di daerah sekitarnya. Disaat itulah pentingnya keberadaan struktur partai sampai di tingkatan ranting. Di Desa Jetak ini struktur DPRa ada sejak tahun 2000 sehingga masyarakat sudah begitu dekat dengan para pengurus.

Mengacu pada lima hal diatas tersebut terlihat bahwa tampilan citra, kebersamaan, kedekatan serta perhatian terhadap masyarakat yang dilakukan secara terus menerus merupakan faktor kunci alasan pilihan masyarakat dalam memilih partai politik.

Perhatian yang diberikan secara terus menerus bukan dilandaskan pada momentum pemilu saja akan memberikan ikatan psikologis bagi masyarakat terhadap partai politik. Dan kelima hal tersebut mampu disuguhkan oleh PKS desa Jetak kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik dalam pemilihan umum dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu alasan idiologis, alasan rasionalitas, serta alasan pragmatis.
2. Kelompok masyarakat dengan alasan idologis ini hanya sebagian kecil yang umumnya dari tokoh agama yang fanatik dengan pemahaman keagamanya.
3. Kelompok masyarakat dengan alasan rasionalitas adalah masyarakat yang melihat platform, visi misi, track record Caleg, serta program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. Jumlahnya cukup banyak karena terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama serta kalangan masyarakat yang terbuka oleh informasi.
4. Kelompok masyarakat dengan alasan pragmatis adalah mereka yang menentukan pilihannya karena dorongan program sesaat menjelang pemilu, mislanya kaos, sembako, kedatangan artis ibukota, atau bahkan politik uang yang diterimanya.
5. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemenangan PKS di Desa Jetak ada lima factor yaitu Fenomena Partai yang santun dalam berdemonstrasi, Keperpihakan terhadap kehidupan Wong Cilik, Partai yang masih bersi dan peduli, keberadaan tokoh local yang mendukung PKS, serta optimalnya peranan struktur partai sampai tingkatan paling bawah.

6. Pemilih saat ini lebih pintar dalam menentukan pilihannya. Sebagai bahan pertimbangan yaitu pemilih lebih memilih partai yang tidak KKN, komit dengan janji-janjinya, serta berpihak pada rakyat kecil.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada kader – kader PKS adalah sebagai berikut :

1. Bagi kader-kader PKS agar tetap mempertahankan ideologinya sebagai partai islam. Karena sudah menjadi *brand image* PKS sebagai partai yang sinergis dengan dakwah.
2. PKS harus terus mempertahankan citra positif sebagai partai yang berpihak pada wong cilik dan partai yang bersih dan peduli pada rakyat.
3. PKS harus lebih banyak melibatkan tokoh masyarakat local untuk menjadi mitra serta menjadi penghubung dengan masyarakat luas.
4. PKS harus hadir dalam bentuk struktur partai sampai tingkatan paling kecil dimasyarakat untuk mnenjaga kebersamaan dengan masyarakat dalam segala kondisi.
5. Untuk Partai Politik secara keseluruhan harus mampu hadir dalam wajah yang lebih ramah serta dalam waktu yang kontinyu bukan hanya saat menjelang pemilu saja.
6. Untuk calon pemilih, hendaknya dalam menentukan pilihannya lebih mempertimbangkan pada ideologi, kader-kader yang akan mewakilinya, sumbangsih partai kepada masyarakat, bukan karena alasan-alasan pragmatisme yang merugikan masyarakat sendiri.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry & Effendi, Bahtiar, 1986, *Merambah Jalan Baru Islam*, Mizan, Bandung
- Almond, Gabriel A. 1985. *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi* dalam Muchtar Masoed, dan Clon Mac Andrews (ed), Perbandingan Sistem Politik, UGM, Yogyakarta.
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Aminuddin, Hilmi. *Menghilangkan Trauma Persepsi*, DPP PKS, Jakarta, 2007
- Arikunto, Suharsiswi. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2004. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang, Cipto. 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badjuri, Abdulkahar, 1997, *Dinamika Politik Nasional*, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Badjuri, Abd. Kahar dan Teguh Yuwono, 2003. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, UNDIP Semarang.
- Budiarjo, Miriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama Persada, Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 1981 (ed) *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta.
- Chaidar, Al, 1419, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai Partai Islam versus Partai Sekuler*, Darul Falah, Jakarta.

- Chilcote, Ronald H, 2004, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cipto, Bambang, 2000, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Daya, Burhanuddin, 1990, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Dhakidae, Daniel, dkk., 1985 *Analisa Kekuatan politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Djafar, Zainuddin, 2005, *Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun?*, FISIP UI Press, Jakarta
- Duverger, Maurice, 1981, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Kepentingan*, terj. Laela Hasyim, Bina Aksara, Jakarta.
- Edward, Djony. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2006
- Esposito, John L & Voll John O, 1995, *Demokrasi di Negara Negara Muslim*, Mizan, Bandung
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Faturohman, Deden & Sobari, I Wawan, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Feith, Herbert & Castles, Lances, 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3ES, Jakarta.
- Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hasbullah, Moesflich (ed), 2003, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Fokusmedia, Bandung.
- Hariyanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
- Hariyanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty: Yogyakarta
- Hendrarso, Emi Susanto. 1985. *Penelitian Kualitatif* (dalam Bagong Suyanto dkk (ed) Metode Penelitian Sosial) Airlangga University Press, Surabaya.
- Isjwara, F, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, Putra Bardin, Bandung.
- Irsyam, Mahrus dan Romli, Lili. 2003. *Menggugat Partai Politik. Laboratorium Ilmu politik UI, Jakarta.*

- J.A, Denny, 2004, *Jejak Pendapat dan Pemilu di Indonesia*, LSI, Jakarta.
- Kamaruddin, 2003, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi*. Visi Publishing, Jakarta.
- Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Karim, Rusli, 1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Koirudin, 2004, *Profil Pemilu 2004*, Pustaka Belajar, Jogjakarta.
- Kuntowijoyo, 1985, *Dinamika Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Salahuddin Press, Yogyakarta
- Majelis Pertimbangan PKS, *Memperjuangkan Masyarkat Madani*, DPP PKS, Jakarta, 2007.
- Machmudi, Yon, 2005, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Harakatuna Publishing, Bandung.
- Masoed Mohtar, 2003, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Masoed Muchtar dan Colin Mac Andrews (ed). 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Masoed, Mohtar, 2003, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Furqon, Any, 2004. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Teraju, Jakarta.
- Muhammad Ghadban, Munir, 2001, *Kompromi Politik dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Nasution, Noviantika, 2006, *Bobolnya Kandang Banteng*, Suara Bebas, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1985, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta.
- Nurwahid, Hidayat M, 2004, *Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani*, Fikri Publishing, Jakarta
- Oetomo, Dede, 1995, *Penelitian Kualitatif* (dalam Bagong Suyanto, dkk. (ed); Metode Penelitian Sosial), Airlangga University Press, Surabaya.

- PKS, DPP, 2005. *Rencana Strategis Partai Keadilan Sejahtera 2005-2010*, Jakarta
- PKS, DPP, 2003, *Mobilitas Kader Dakwah: Arah Kebijakan Dakwah dalam Pemberdayaan SDM*, Jakarta
- PKS, DPP, 2003, *Muslimah Menuju Era Siyasa*, Jakarta
- PKS, DPP, 1422, *Rakornas Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta.
- PKS, DPP, 2005, *Fatwa Fatwa Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta
- Putra, Fadilah, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Qardhawi, Yusuf, 2001, *Ummat Islam Menyongsong Abad ke 21*, Era Intermedia, Solo.
- Qodir, Zuli (ed), 1999, *ICMI Negara dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasyid, Daud, 2001, *Islam dan Reformasi*, Usamah Press, Jakarta.
- Ridha, Abu, 2003, *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*, Syamil, Bandung.
- Romli, Lili. 3003. *Potret Buram Partai Politik di Indonesia*. Dalam Lili Romli dan Mahrus Irsyam 2003 (ed) *Menggugat Partai Politik*, Fisip UI, Jakarta.
- Saifudin Anshari, Endang, 1997, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sanit, Arbi, dalam Mahrus Irsyam & Lili Romli (ed). 2003. *Pembaharuan Mendasar Partai Politik*. FISIP Universitas Indonesia.
- Sembiring, Tifatul. *Dakwah Adalah Perubahan Kearif Yang Lebih Baik*, DPP PKS, Jakarta, 2007
- Singarimbun, Masri & Efendi Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Stange, Paul, 1998, *Politik Perhatian: Rasa dalam Kebudayaan Jawa*, LKiS, Jogjakarta.
- Soehartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1979. *Memahami ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta.
- Taimiyah, Ibnu, 2004, *Tugas Negara Menurut Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tiana Rosa, Helvy. 2003, *Bukan Di Negeri Dongeng*, Syamil Cipta Media, Bandung.

Wahono, Untung, 2003. *Peran Politik Poros Tengah dalam Kancah Perpolitikan Indonesia*, Tarbiyatuna, Jakarta.

Wibowo, Edi, 2004, *Ilmu Politik Kontemporer*, YPAPI, Jakarta.